



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**

MAHKAMAH PELAYARAN



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH PELAYARAN**

JANUARI 2023

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LAKIP Mahkamah Pelayaran ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang wajib menjalankan Amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga unit kerja Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan LAKIP Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Government*, dan sekaligus sebagai bentuk penilaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan. Mahkamah Pelayaran terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang baik yang bersifat administratif maupun teknis melalui upaya-upaya seperti yang tertuang dalam visi dan misi Mahkamah Pelayaran.

Dalam dokumen LAKIP Mahkamah Pelayaran ini disajikan gambaran secara transparan mengenai pencapaian kinerja Mahkamah Pelayaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun serta dikaitkan dengan upaya-upaya strategis operasional yang telah dilakukan dan disampaikan juga terkait hambatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.

Sangat disadari bahwa dalam LAKIP Mahkamah Pelayaran masih banyak kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan memperoleh umpan balik bagi seluruh jajaran Mahkamah Pelayaran guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan guna tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan di masa yang akan datang .

Akhir kata, saya selaku Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Mahkamah Pelayaran Tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



HARY KRISWANTO, S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631115 199203 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang wajib menjalankan Amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana unit kerja Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Mahkamah Pelayaran dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- 2) Pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- 3) Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;

- 4) Pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran;
- 5) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dimaksud melalui 5 (lima) sasaran kinerja yang meliputi :

- 1) Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi.
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran.
- 4) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran

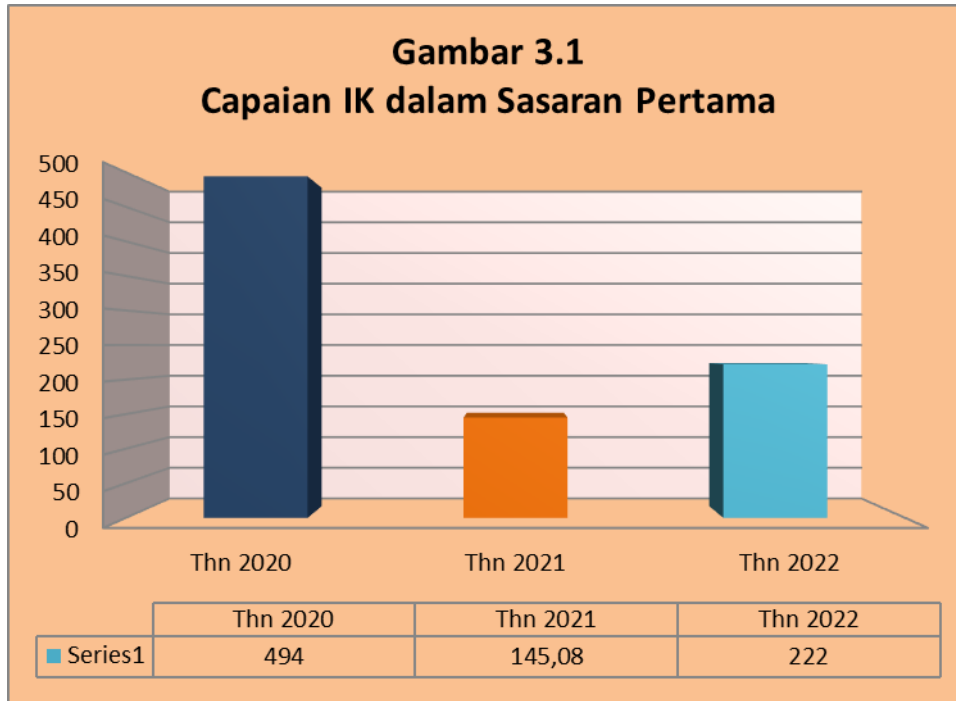
Berdasarkan tahapan pengukuran dihasilkan Nilai capaian kinerja sasaran program Mahkamah Pelayaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahun 2022 sebesar 66%, realisasi mencapai 100% dan persentase capaian kinerja 152%, sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 100% dari alokasi anggaran DIPA 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66	100	152
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	70	70
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Jumlah Keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		4) Persentase Dukungan manajemen reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	90,50	90,50

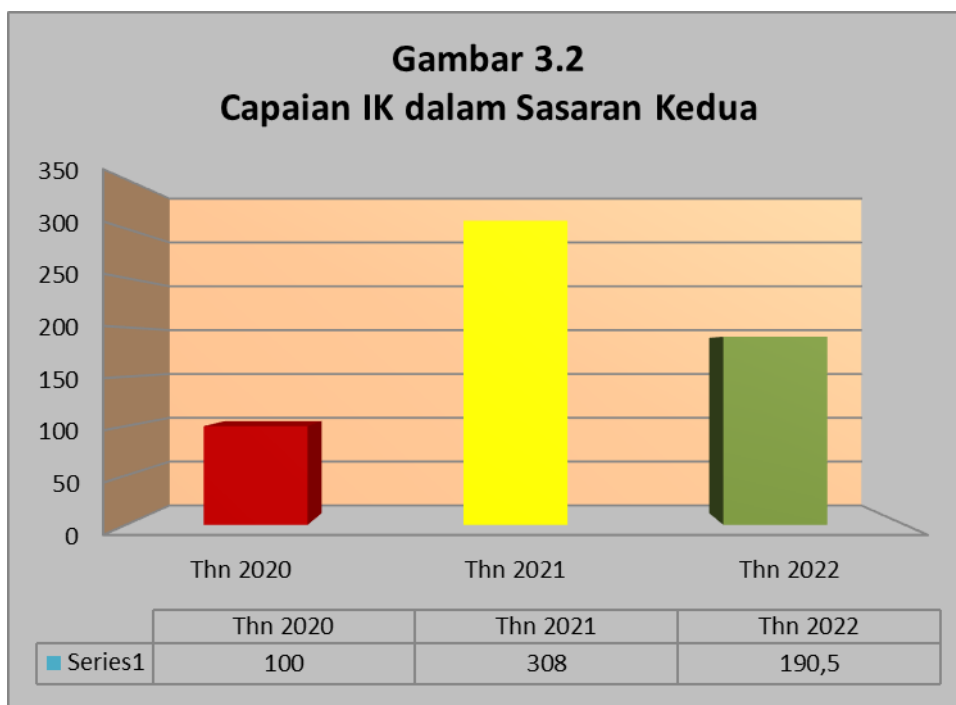
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Regulasi Hukum Bidang Ttransportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman penganggaran dan	6) Jumlah Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5	5	100
		7) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	99,77	99,77
		8) Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2	2	100
		9) Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1	1	100
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	185	185
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2	2	100
		12) Kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Manajemen Pegawai Mahkamah Pelayaran	Dokumen	4	4	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	100	100	100
		14) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100

Adapun Capaian dari Sasaran Strategis Kantor Mahkamah Pelayaran antara lain :

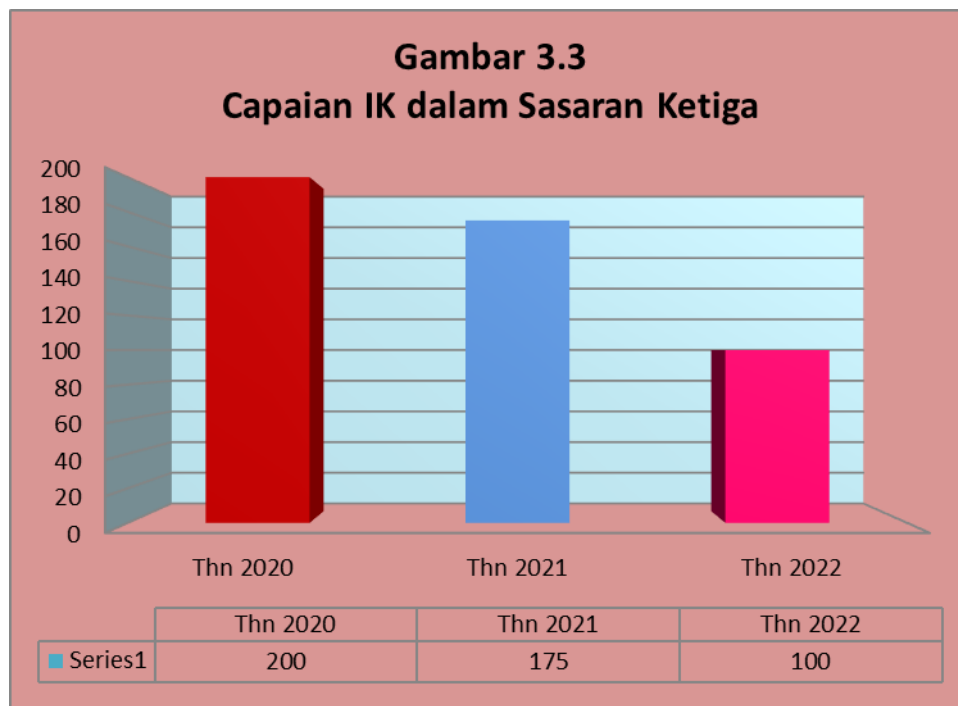
- a. **Sasaran Strategis Pertama** adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”.



- b. **Sasaran Strategis kedua** adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”.



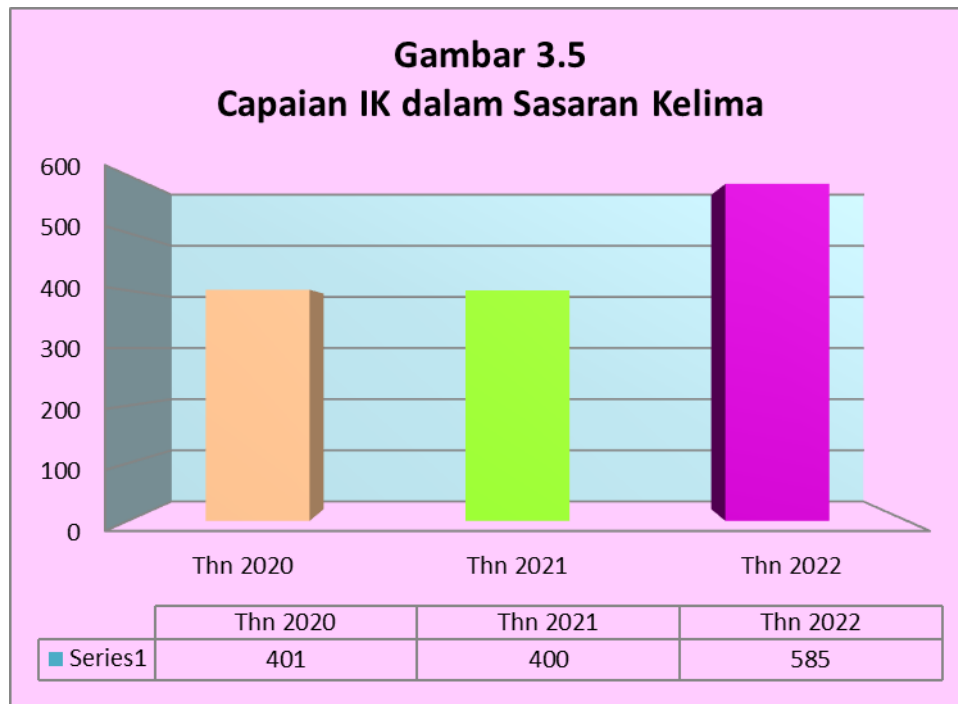
- c. Sasaran Strategis ke tiga adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”.



- d. Sasaran Strategis ke empat adalah “Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran”.



- e. Sasaran Strategis ke lima adalah “Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran”.



Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran sebanyak 70 Pegawai terdiri dari 34 orang PNS dan 36 PPNN, serta kesediaan anggaran sebesar Rp. 17.487.930.000, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.910.596.000, Belanja Barang sebesar Rp. 9.032.981.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 544.353.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai 2022 adalah sebesar Rp. 17.449.583.178 atau 99,77.%, sisa dana tidak terserap sebesar Rp. 39.582.002 merupakan sisa kegiatan dari :

a. Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 195.690,-,

b. Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp 39.385.533,-

c. Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 783,-

Secara rinci dan detail penjelasan terhadap seluruh keberhasilan yang ada dalam Sasaran Strategis disetiap Indikator Kinerja Utama terdapat dalam BAB III pada LAKIP Mahkamah Pelayaran.

Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan unit kerja Mahkamah Pelayaran telah berhasil dalam mencapai kinerjanya, karena hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan melebihi dari target awal yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.....	21
E. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran	24
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	30
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja.....	38
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	41
II. Perbandingan Target Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	43
III. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RENSTRA)...	45
IV. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	47
V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
B. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran/Rekomendasi	84

DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
1.1	SDM kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.2	SDM 2 Subbagian dan 2 Sub Koordinator dan Jenis Kelamin	BAB I – 9
1.3	SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 10
1.4	SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	BAB I – 11
1.5	SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 12
1.6	SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 13
1.7	SDM PNS Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 14
1.8	SDM PNS Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin	BAB I – 15
1.9	SDM PPNNP Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 16
1.10	SDM PPNNP Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 18
1.11	SDM PPNNP Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 19
1.12	SDM PPNNP Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 20
2	Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran	BAB II – 25
2.1	Tabel RKT 2022	BAB II – 31
2.2	Perjanjian Kinerja 2022	BAB II – 34
2.3	Target dan Realisasi IKU Tahun 2020 - 2022	BAB II – 36
2.4	Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2022	BAB II – 37
3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	BAB III – 41
3.1	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	BAB III – 43
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah (Renstra)	BAB III – 45
3.3	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022	BAB III – 72

3.4	Matriks Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka Perhitungan Efisiensi	BAB III – 73
3.5	Matriks Revisi Anggaran 2022	BAB III – 75
3.6	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2022	BAB III – 75
3.7	Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran	BAB III – 76
3.8	Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 78
3.9	Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 79
3.10	Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 80
3.11	Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan	BAB III – 80

DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN

Nomor	Keterangan	Halaman
1	Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran	BAB I – 7

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
3.1	Capaian IK Dalam Sasaran Pertama	BAB III – 47
3.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	BAB III – 48
3.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan Kedua (IKK 2)	BAB III – 49
3.2	Capaian IK Dalam Sasaran Kedua	BAB III – 50
3.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga (IKK 3)	BAB III – 51
3.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan Keempat (IKK 4)	BAB III – 52
3.3	Capaian IK dalam Sasaran Ketiga	BAB III – 54
3.3.1	Indikator Kinerja Kegiatan Kelima (IKK 5)	BAB III – 55
3.4	Capaian IK dalam Sasaran Keempat	BAB III – 56
3.4.1	Indikator Kinerja Kegiatan Keenam (IKK 6)	BAB III – 58
3.4.2	Indikator Kinerja Kegiatan Ketujuh (IKK 7)	BAB III – 59
3.4.3	Indikator Kinerja Kegiatan Kedelapan (IKK 8)	BAB III – 60
3.4.4	Indikator Kinerja Kegiatan Kesembilan (IKK 9)	BAB III – 61
3.5	Capaian IK dalam Sasaran Kelima	BAB III – 62
3.5.1	Indikator Kinerja Kegiatan Kesepuluh (IKK 10)	BAB III – 63
3.5.2	Indikator Kinerja Kegiatan Kesebelas (IKK 11)	BAB III – 65
3.5.3	Indikator Kinerja Kegiatan Kedua belas (IKK 12)	BAB III – 66
3.5.4	Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga belas (IKK 13)	BAB III – 69
3.5.5	Indikator Kinerja Kegiatan Keempat belas (IKK 14)	BAB III – 70
3.6	Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2020 - 2022	BAB III – 76
3.7	Daya Serap Anggaran Keuangan	BAB III – 77
4	Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022	BAB IV – 83

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Keterangan	Halaman
1.1	SDM Kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.2	SDM 2 Subbagian dan 2 Sub Koordinator dan Jenis Kelamin	BAB I – 9
1.3	SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 10
1.4	SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	BAB I – 11
1.5	SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 12
1.6	SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 13
1.7	SDM PNS Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 14
1.8	SDM PNS Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin	BAB I – 15
1.9	SDM PPNP Menurur Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 16
1.10	SDM PPNP Menurur S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 18
1.11	SDM PPNP Menurur Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 19
1.12	SDM PPNP Menurur Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 20
2	Target IKU tahun 2018-2022	BAB II – 36

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2022;
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
- Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2022;
- Lampiran 5 Matriks Revisi DIPA semula dan menjadi.



A. Latar Belakang

Mahkamah Pelayaran merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang wajib menjalankan amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan sebagai bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran. Dimana Mahkamah Pelayaran memiliki Fungsi dan peran yang sangat strategis sebagai garda terakhir dalam penanganan perkara kecelakaan kapal di perairan Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran maka setiap instansi pemerintah diharuskan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai salah satu alat pemacu dalam peningkatan dan perbaikan kinerja bagi instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk memastikan peningkatan pelayanan

publik, pelaksanaan *good governance* dalam organisasi dan untuk memudahkan penilaian terhadap suatu organisasi sebagaimana tuntutan masyarakat pada era keterbukaan seperti yang terjadi saat ini.

Lebih lanjut terkait Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung sasaran program Mahkamah Pelayaran perlu dilakukan pencapaian kinerja pada capaian indikator kinerja, capaian kinerja (*Performance Result*) tahun 2022 yang akan dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam penjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Mahkamah Pelayaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika pelaporan LAKIP ini berisikan pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan kegiatan Mahkamah Pelayaran Tahun 2022. LAKIP Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Mahkamah Pelayaran atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022 juga merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Mahkamah Pelayaran pada tahun 2022 sekaligus juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang.

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2022, dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang

telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Mahkamah Pelayaran, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategis Mahkamah Pelayaran di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategis ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa visi dan misi Mahkamah Pelayaran terpenuhi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran adalah Unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan, Ketua dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

Mahkamah Pelayaran bukan merupakan lembaga peradilan tetapi merupakan suatu lembaga kode etik profesi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Pelayaran mengemban peranan yang sangat penting dalam hal keselamatan pelayaran serta dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan keamanan pelayaran sesuai dengan Visi dan Misi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan atau/perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
2. Pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
3. Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;

4. Pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran; dan
5. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Ketua;
2. Anggota Panel Ahli;
3. Sekretariat, dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Ketua dan Anggota Panel Ahli :

1) Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran.

2) Anggota Panel Ahli

Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau/tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal serta melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, serta menyusun rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian terhadap penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.

Anggota Panel Ahli, Jumlah dan Tanggung Jawab :

- a. Anggota Panel Ahli terdiri atas Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknik Tingkat I, Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Perkapalan;
- b. Jumlah Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20 (dua puluh) orang, dan saat ini Panel Ahli berjumlah 14 (empat belas) orang;
- c. Anggota Panel Ahli bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.

3) Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi;
- b) Pelaksanaan urusan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas;
- c) Pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan; dan
- d) Pemeriksaan kelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya, pelaksana verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

4) Sekretaris Panel Ahli

Sekretaris Panel Ahli adalah Aparatur Sipil Negara, yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Pelayaran sebagai Sekretaris Panel Ahli. Mahkamah Pelayaran mempunyai 3 (tiga) orang yang menjabat Sekretaris Panel Ahli.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Di Lingkungan Mahkamah Pelayaran dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Mahkamah Pelayaran

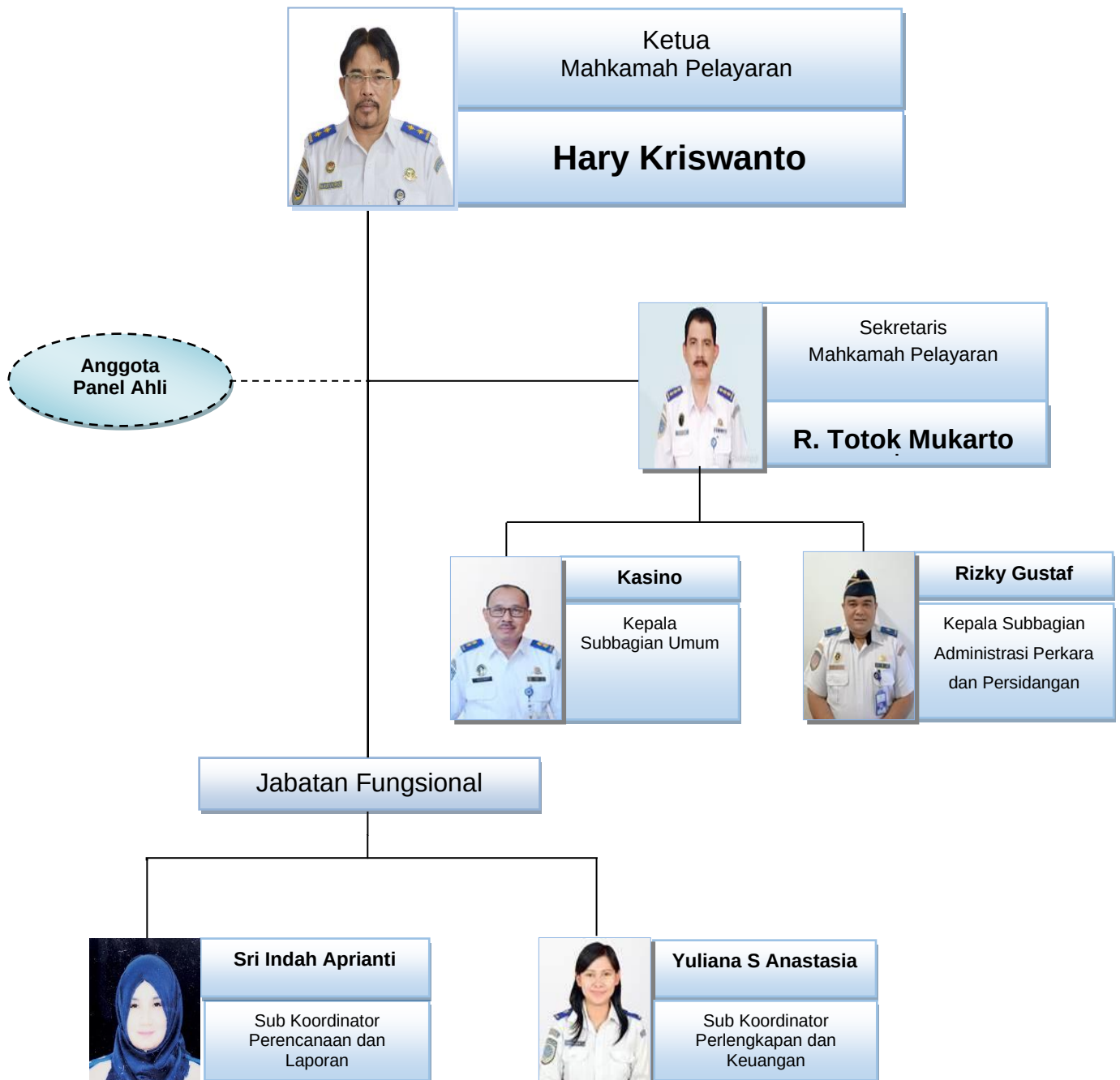
saat ini mempunyai 3 (tiga) orang yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu.

- c) Dalam Pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- d) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- h) Tugas dan jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Bagan organisasi Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran
 Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mahkamah Pelayaran hingga saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 (empat) orang, Fungsional tertentu 3 (tiga) orang, Pegawai Fungsional Umum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Non PNS 37 (tiga puluh tujuh) orang (terdiri dari Anggota Panel Ahli 14 orang dan PPNPN 23 orang).

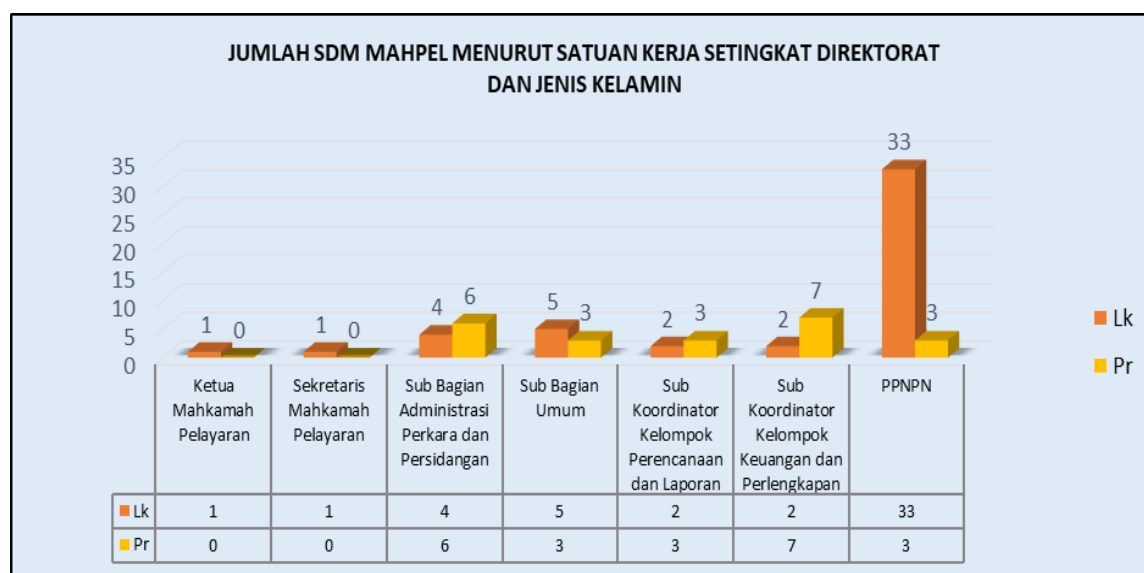
Berikut ini tabel dan Grafik Data Terpilah (format data pusdatin) :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Tabel 1.1 SDM kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin

No	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Mahkamah Pelayaran							-	-	-
1	Ketua Mahkamah Pelayaran	1	0	1	100,00	0,00	100,00	2,08	0,00	1,43
2	Sekretaris Mahkamah Pelayaran	1	0	1	100,00	0,00	100,00	2,08	0,00	1,43
3	Sub Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan	4	6	10	40,00	60,00	100,00	8,33	27,27	14,29
4	Sub Bagian Umum	5	3	8	62,50	37,50	100,00	10,42	13,64	11,43
5	Sub Koordinator Perencanaan dan Laporan	2	3	5	40,00	60,00	100,00	4,17	13,64	7,14
6	Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	2	7	9	22,22	77,78	100,00	4,17	31,82	12,86
7	PPNPN	33	3	36	91,67	8,33	100,00	68,75	13,64	51,43
	JUMLAH	48	22	70	68,57	31,43	100,00	100,00	100,00	100,00

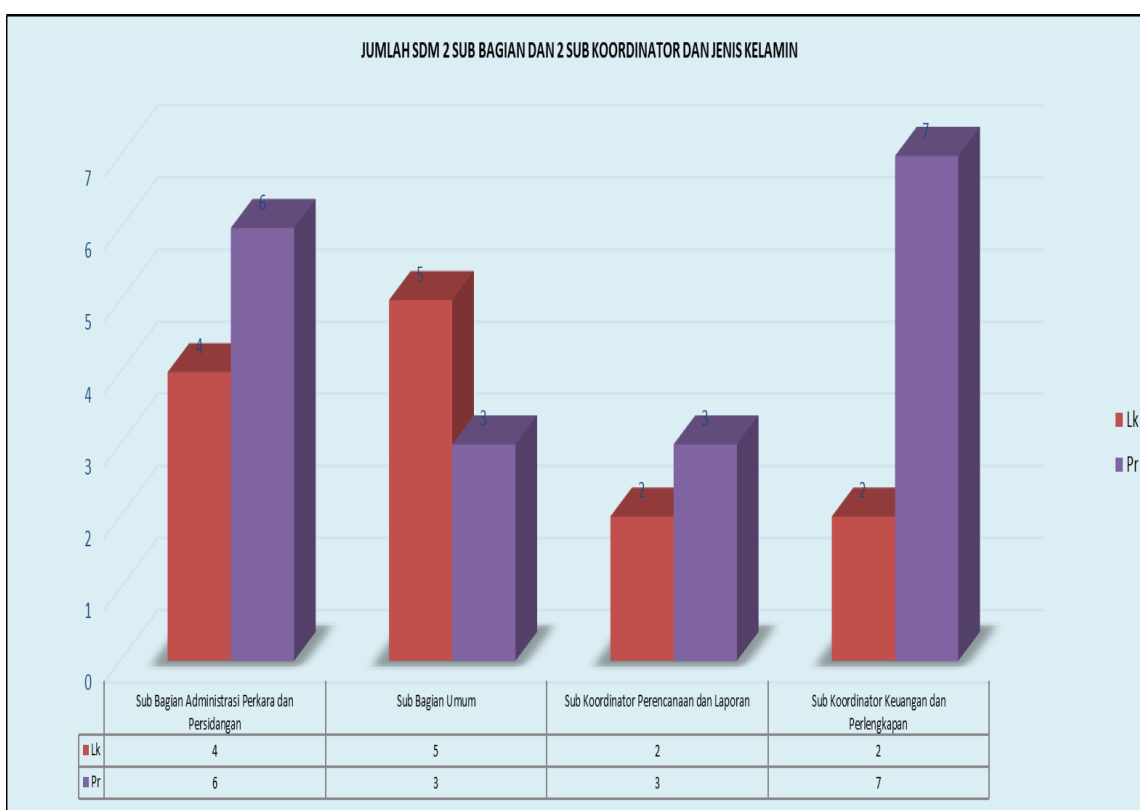
Grafik 1.1. SDM kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin



Tabel 1.2. SDM 2 Sub Bagian dan 2 Sub Koordinator dan Jenis Kelamin

No	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2 Sub Bagian dan 2 Sub Koordinator Kelompok									
1	Sub Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan	4	6	10	40,00	60,00	100,00	30,77	31,58	31,25
2	Sub Bagian Umum	5	3	8	62,50	37,50	100,00	38,46	15,79	25,00
3	Sub Koordinator Perencanaan dan Laporan	2	3	5	40,00	60,00	100,00	15,38	15,79	15,63
4	Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	2	7	9	22,22	77,78	100,00	15,38	36,84	28,13
	JUMLAH	13	19	32	40,63	59,38	100,00	100,00	100,00	100,00

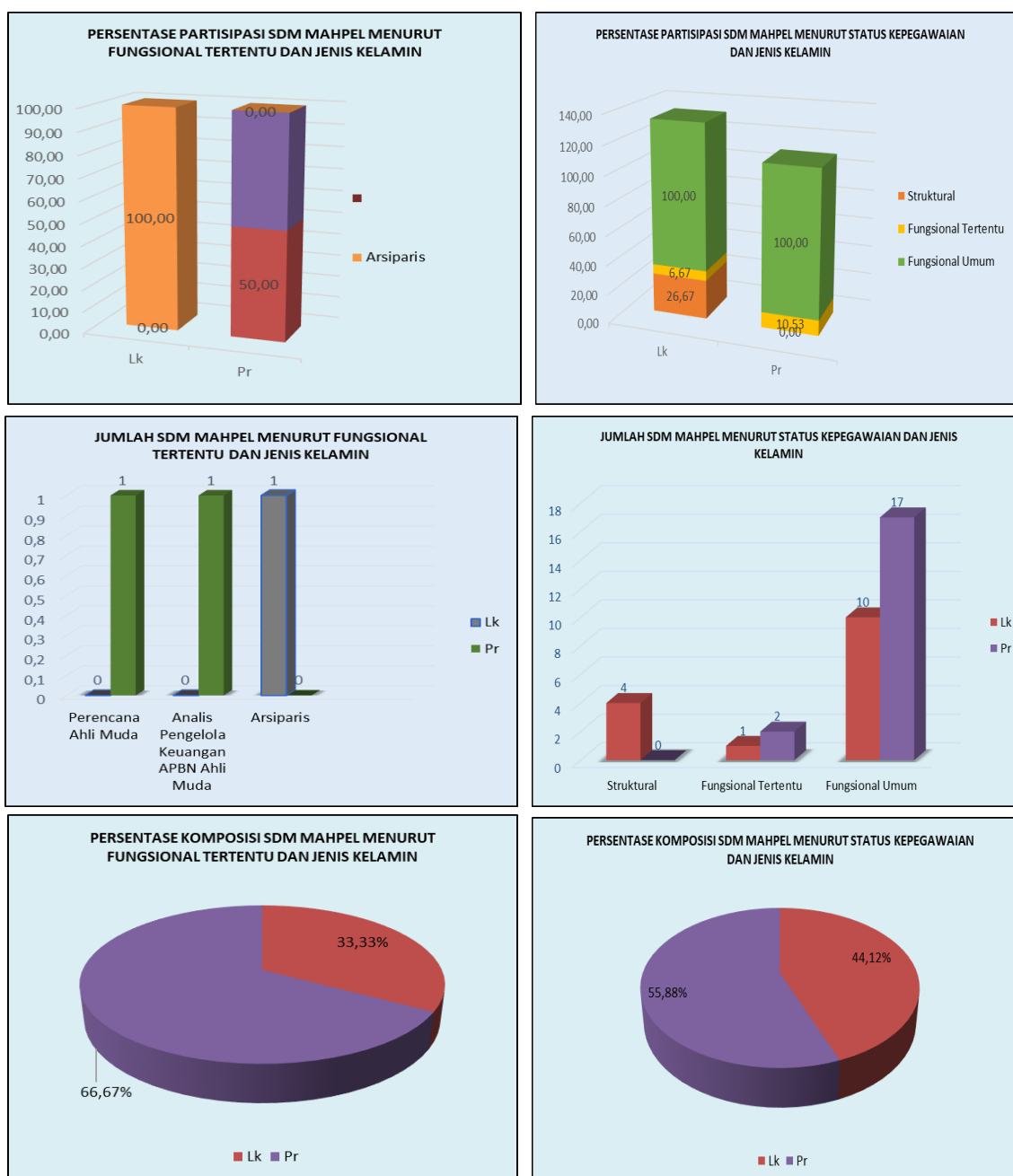
Grafik 1.2. SDM 2 Sub Bagian dan 2 Sub Koordinator dan Jenis Kelamin



Tabel 1.3. SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
I	Struktural									
1.1	Eselon II	1	0	1	100,00	0,00	100,00	25,00	#DIV/0!	25,00
1.2	Eselon III	1	0	1	100,00	0,00	100,00	25,00	#DIV/0!	25,00
1.3	Eselon IV	2	0	2	100,00	0,00	100,00	50,00	#DIV/0!	50,00
	Sub Total	4	0	4	100,00	0,00	100,00	26,67	0,00	11,76
II	Fungsional Tertentu									
2.1	Perencana Ahli Muda	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	33,33
2.2	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	33,33
2.3	Arsiparis	1	0	1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33
	Sub Total	1	2	3	33,33	66,67	100,00	6,67	10,53	8,82
III	Fungsional Umum	10	17	27	37,04	62,96	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Total	10	17	27	37,04	62,96	100,00	100,00	100,00	100,00
	JUMLAH	15	19	34	44,12	55,88	100,00	133,33	110,53	120,59

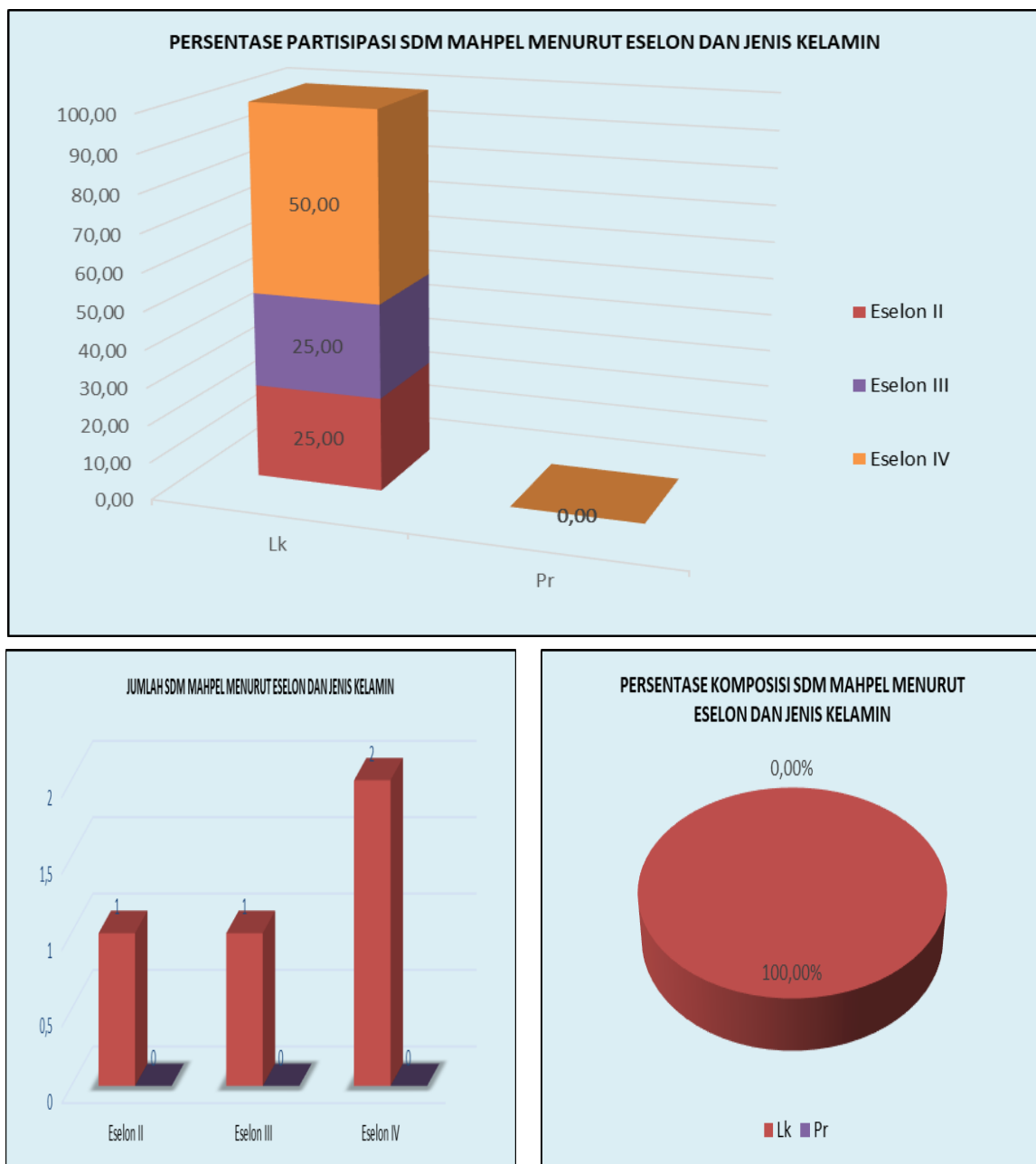
Grafik 1.3. SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Tabel 1.4. SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawaiian			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Paripisipi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	1	0	1	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00
2	Eselon III	1	0	1	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00
3	Eselon IV	2	0	2	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	Jumlah	4	0	4	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

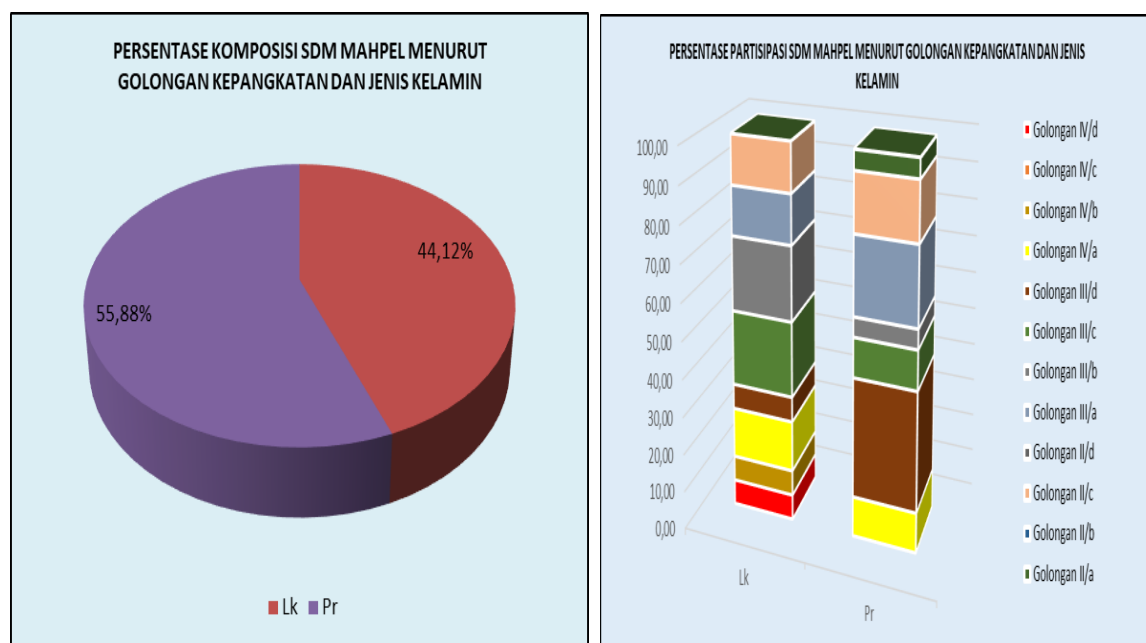
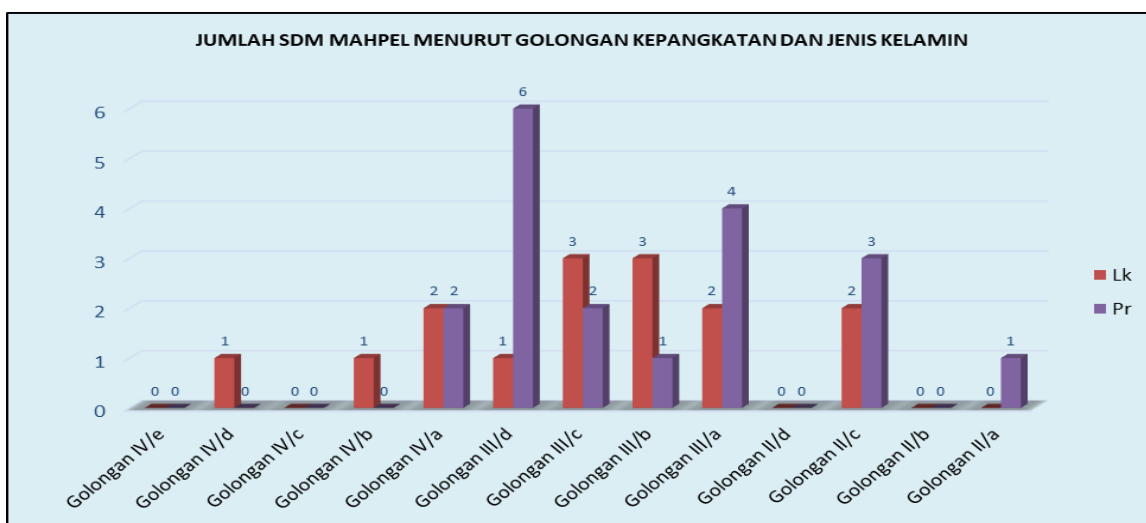
Grafik 1.4. SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin



Tabel 1.5. SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawaiian			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Paripipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV/e	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Golongan IV/d	1	0	1	100,00	0,00	100,00	6,67	0,00	2,94
3	Golongan IV/c	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Golongan IV/b	1	0	1	100,00	0,00	100,00	6,67	0,00	2,94
5	Golongan IV/a	2	2	4	50,00	50,00	100,00	13,33	10,53	11,76
6	Golongan III/d	1	6	7	14,29	85,71	100,00	6,67	31,58	20,59
7	Golongan III/c	3	2	5	60,00	40,00	100,00	20,00	10,53	14,71
8	Golongan III/b	3	1	4	75,00	25,00	100,00	20,00	5,26	11,76
9	Golongan III/a	2	4	6	33,33	66,67	100,00	13,33	21,05	17,65
10	Golongan II/d	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Golongan II/c	2	3	5	40,00	60,00	100,00	13,33	15,79	14,71
12	Golongan II/b	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Golongan II/a	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	5,26	2,94
JUMLAH		15	19	34	44,12	55,88	100,00	100,00	100,00	100,00

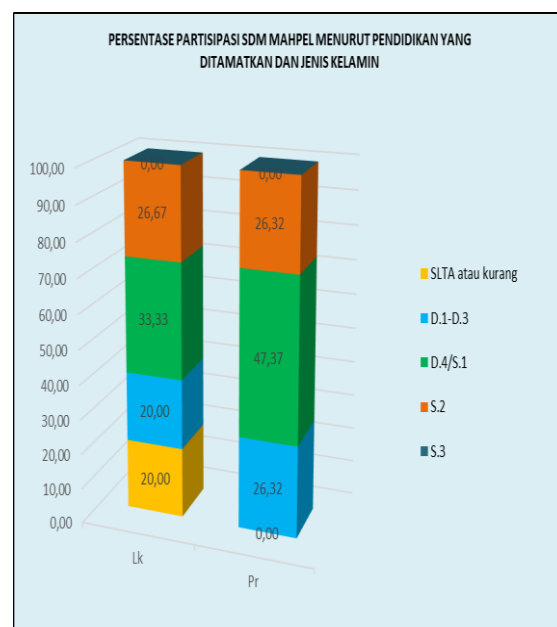
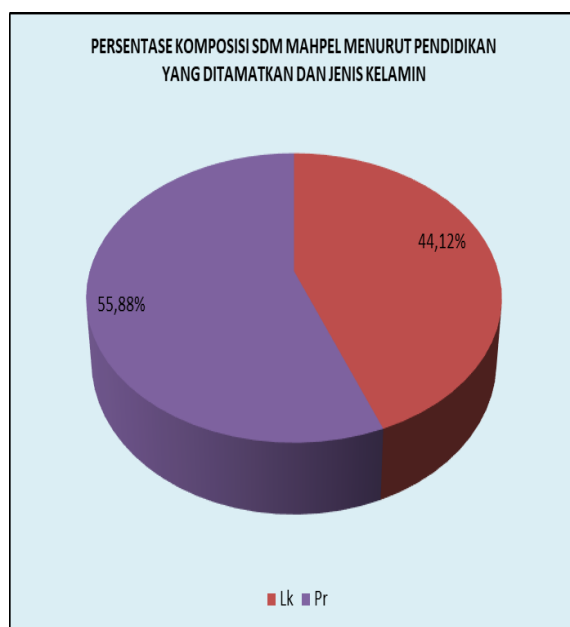
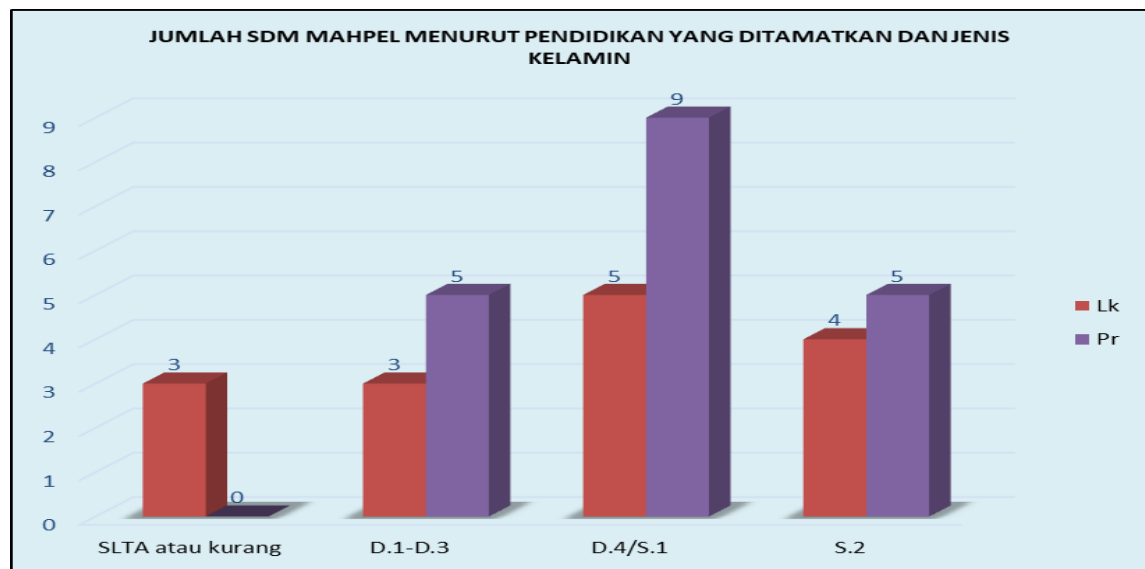
Grafik 1.5. SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin



Tabel 1.6. SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SLTA atau kurang	3	0	3	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	8,82
2	D.1-D.3	3	5	8	37,50	62,50	100,00	20,00	26,32	23,53
3	D.4/S.1	5	9	14	35,71	64,29	100,00	33,33	47,37	41,18
4	S.2	4	5	9	44,44	55,56	100,00	26,67	26,32	26,47
5	S.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		15	19	34	44,12	55,88	100,00	100,00	100,00	100,00

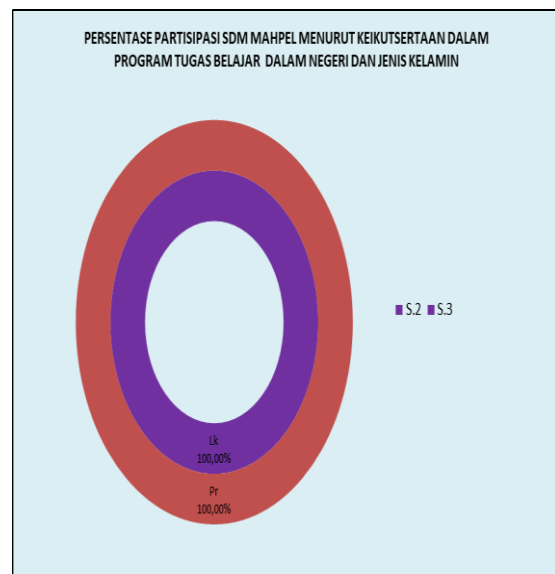
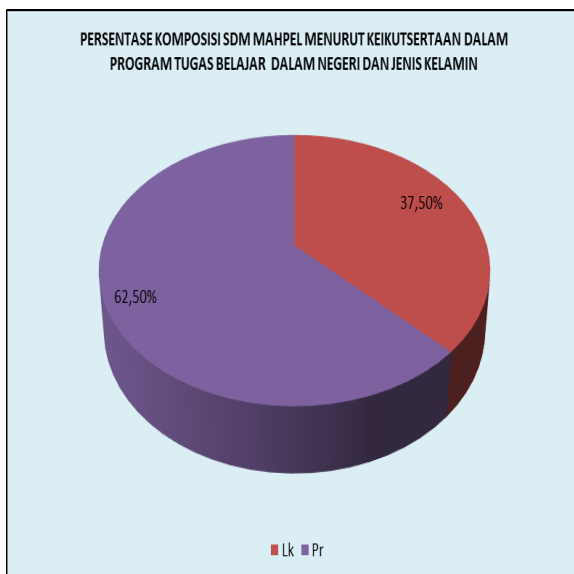
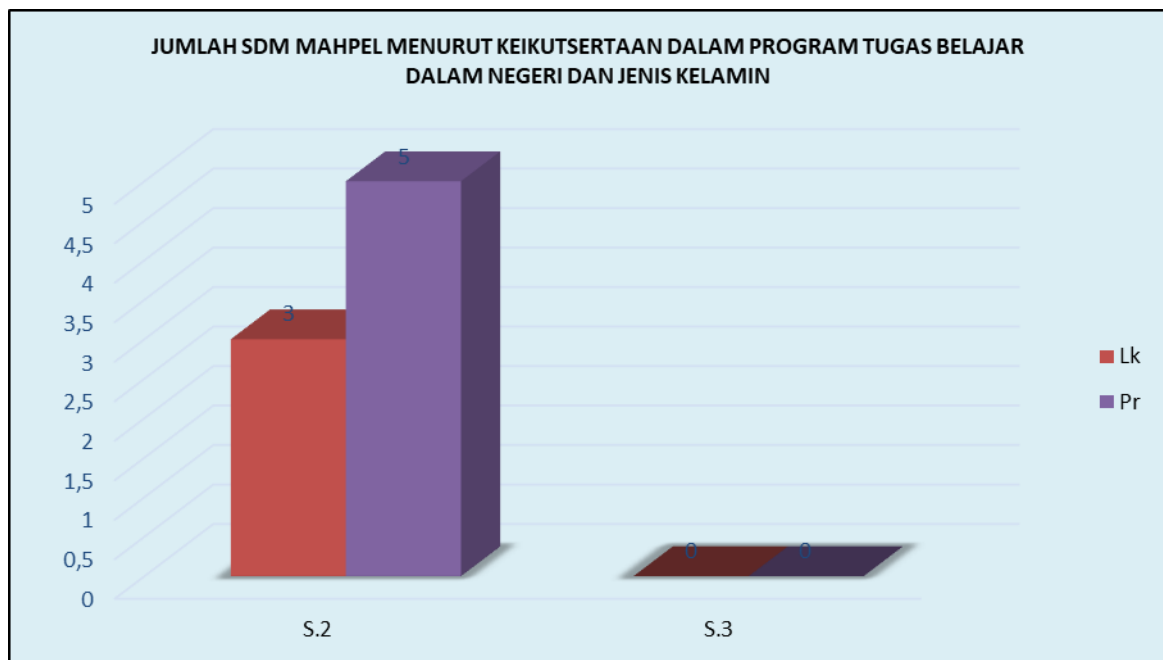
Grafik 1.6. SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin



Tabel 1.7. SDM PNS Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan di Luar/Dal Negeri	Jumlah Pegawaiian			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Paripisipi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan Luar Negeri									
	S.2	1	0	1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	S.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	1	0	1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Pendidikan Dalam Negeri									
	S.2	3	5	8	37,50	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00
	S.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	3	5	8	37,50	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00
	JUMLAH	4	5	9	44,44	55,56	100,00	200,00	100,00	200,00

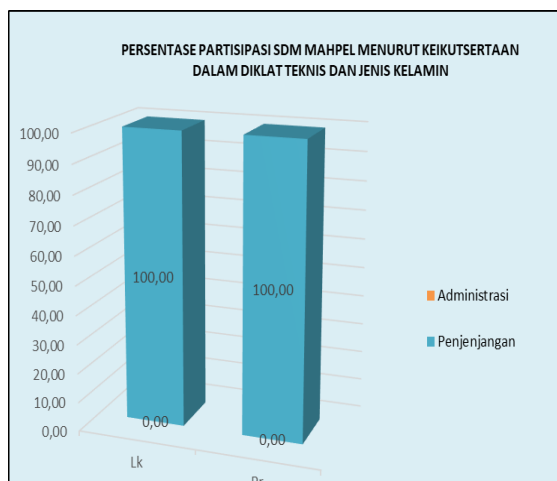
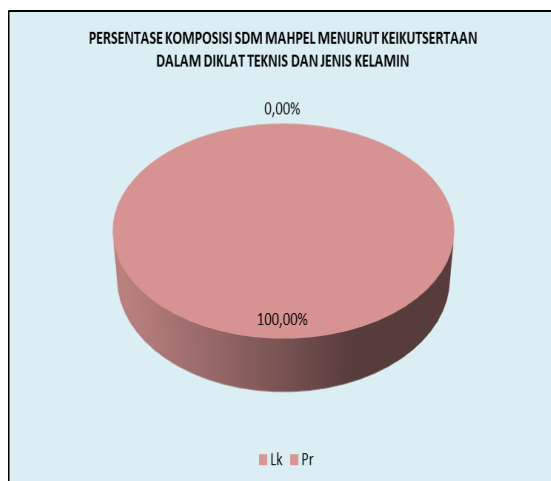
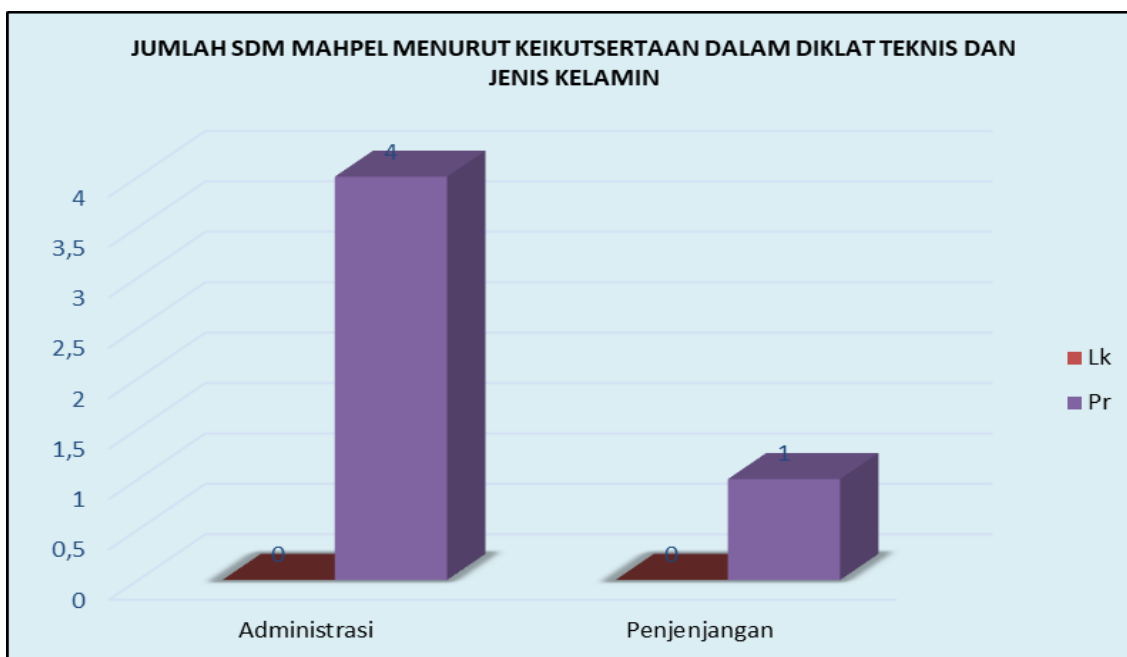
Grafik 1.7. SDM PNS Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin



Tabel 1.8. SDM PNS Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan/Pelatihan Administrasi									
1,1	Diklat Manajemen Krisis	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00
1,2	Pelatihan Dasar CPNS	0	2	2	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00
1,3	Diklat Pengadaan Barang/Jasa	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00
	Sub Jumlah	0	4	4	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan									
2,1	Diklat Penjenjangan P PIM IV	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2,2	Diklat Penjenjangan Q PIM III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	Diklat Penjenjangan R, dst PIM II, PIM I, LEMHANAS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	0	1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	JUMLAH	0	5	5	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00

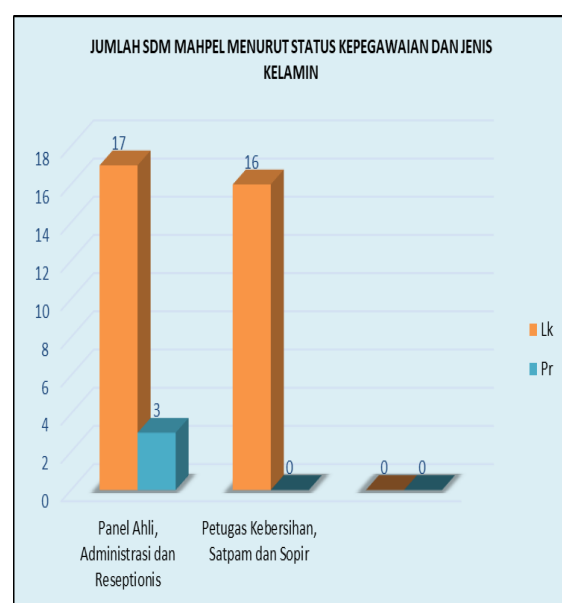
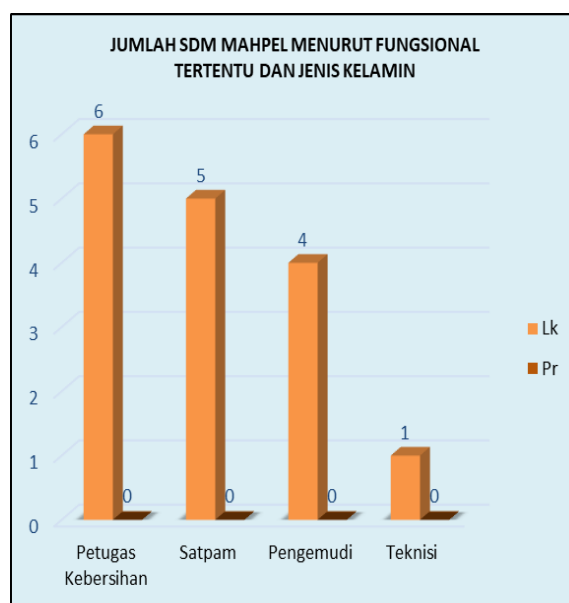
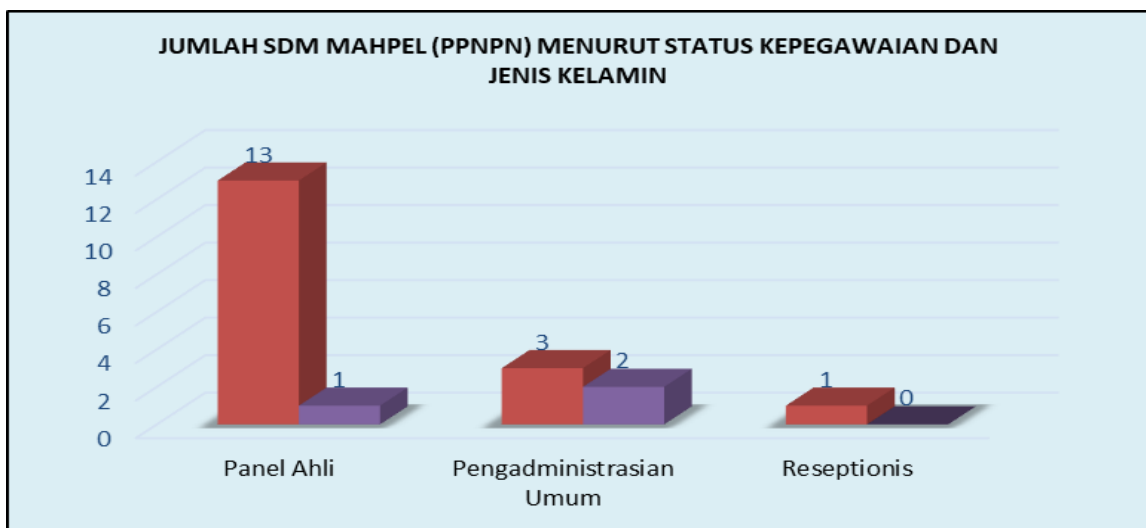
Grafik 1.8. SDM PNS Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin

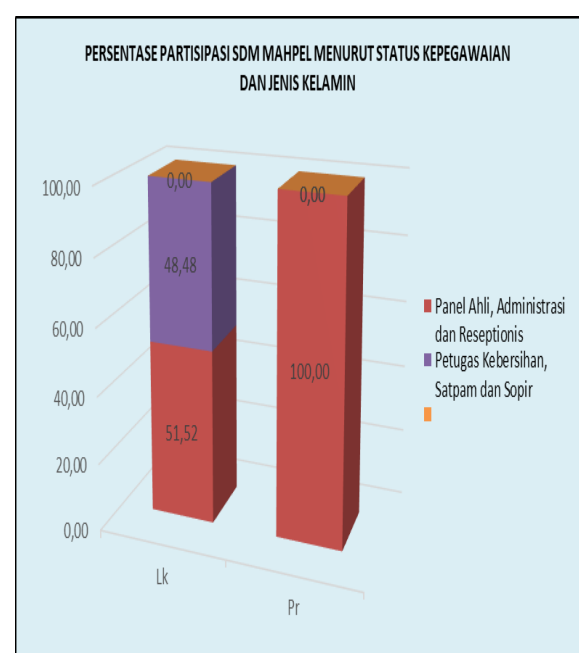
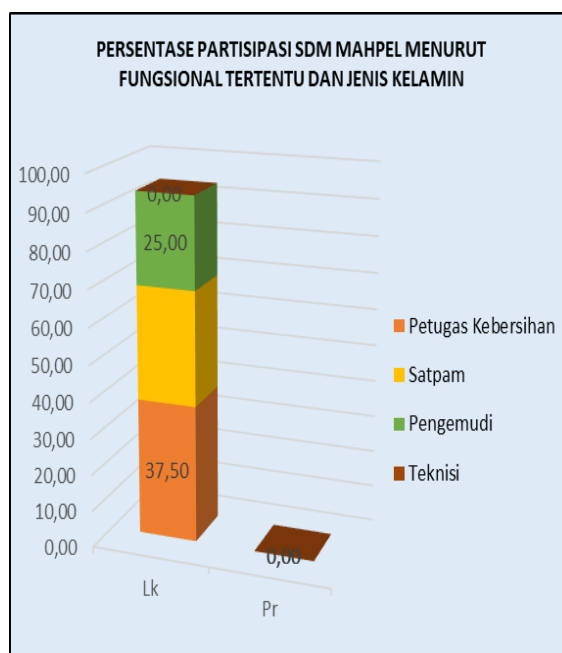
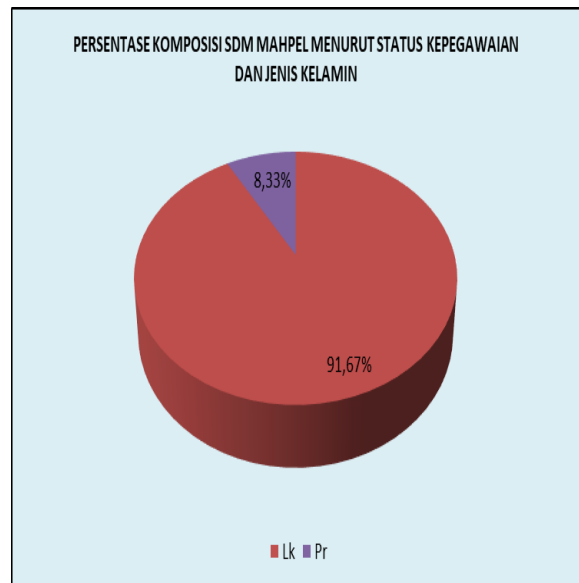
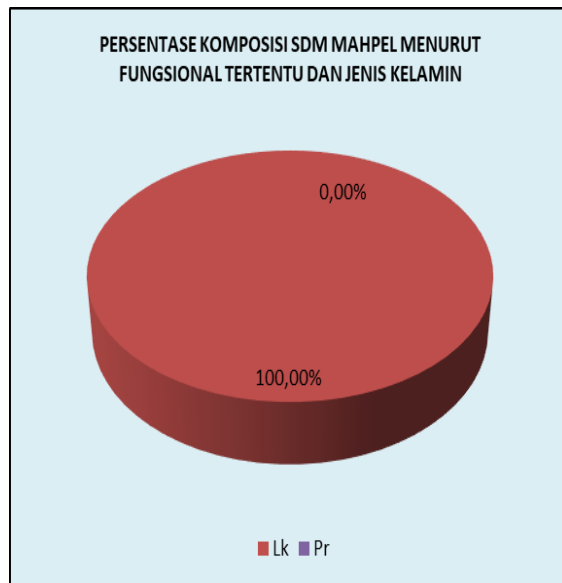


Tabel 1.9. SDM PPNP Menurut Status kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
I	Panel Ahli, Administrasi dan Resepsionis	13	1	14	92,86	7,14	100,00	76,47	33,33	70,00
1.1	Panel Ahli	3	2	5	60,00	40,00	100,00	17,65	66,67	25,00
1.2	Pengadministrasian Umum	1	0	1	100,00	0,00	100,00	5,88	0,00	5,00
1.3	Resepsionis	1	0	1	100,00	0,00	100,00	5,88	0,00	5,00
	Sub Total	17	3	20	85,00	15,00	100,00	51,52	100,00	55,56
II	Petugas Kebersihan, Satpam dan Sopir	6	0	6	100,00	0,00	100,00	37,50	0,00	37,50
2.1	Petugas Kebersihan	5	0	5	100,00	0,00	100,00	31,25	0,00	31,25
2.2	Satpam	4	0	4	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00
2.3	Pengemudi	1	0	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6,25
2.4	Teknisi	1	0	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6,25
	Sub Total	16	0	16	100,00	0,00	100,00	48,48	0,00	44,44
III		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	33	3	36	91,67	8,33	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 1.9. SDM PPNP Menurut Status kepegawaian dan Jenis Kelamin

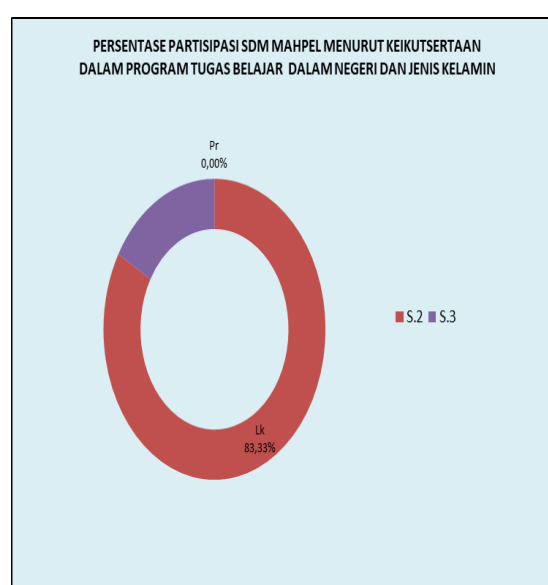
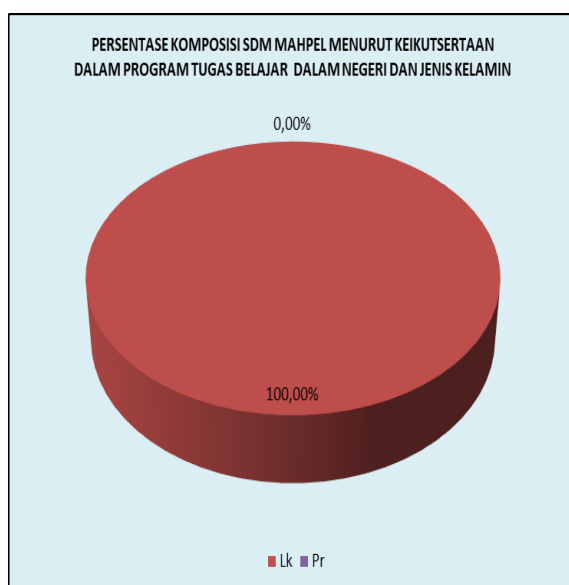
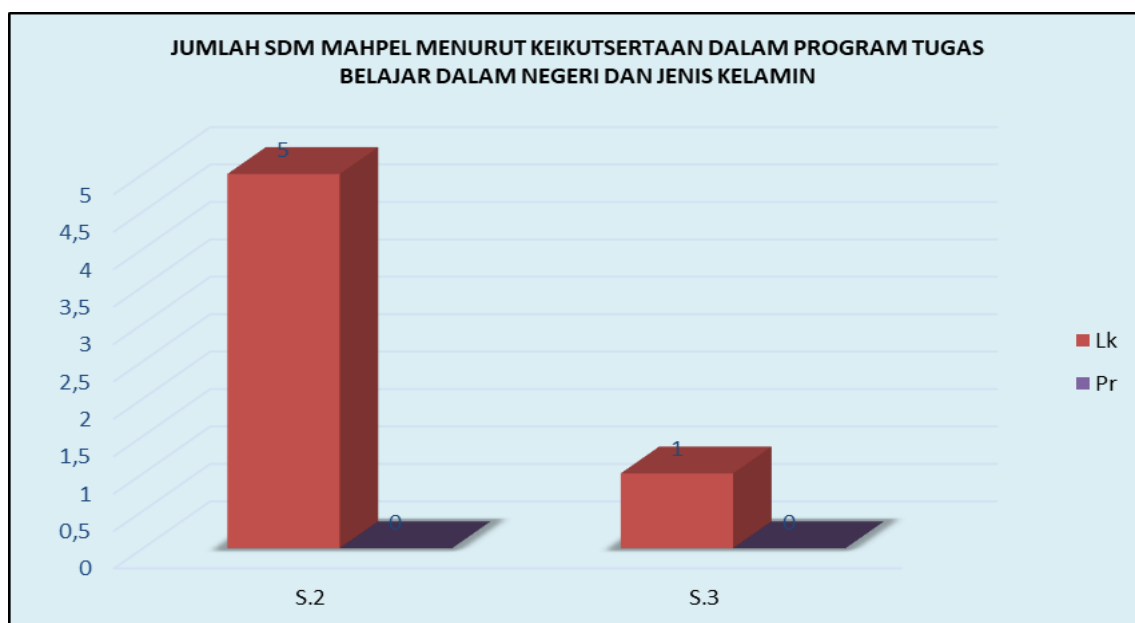




Tabel 1.10. SDM PPNPN Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri
dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan di Luar/Da Negeri	Jumlah Pegawaian			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Paripisipi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan Luar Negeri									
	S.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendidikan Dalam Negeri									
	S.2	5	0	5	100,00	0,00	100,00	83,33	0,00	83,33
	S.3	1	0	1	100,00	0,00	100,00	16,67	0,00	16,67
	Sub Jumlah	6	0	6	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	6	0	6	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

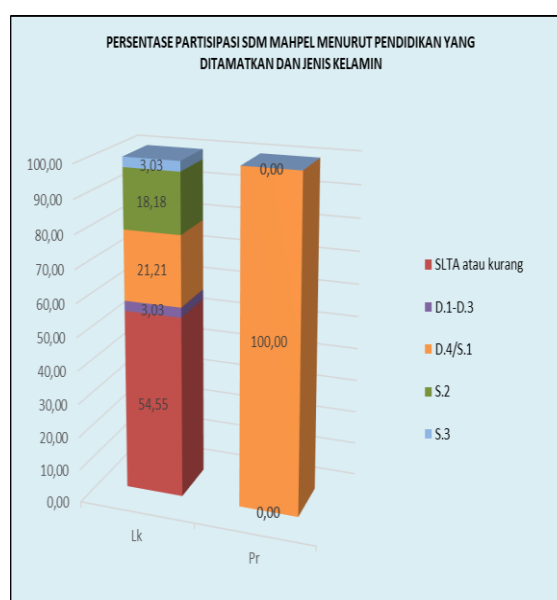
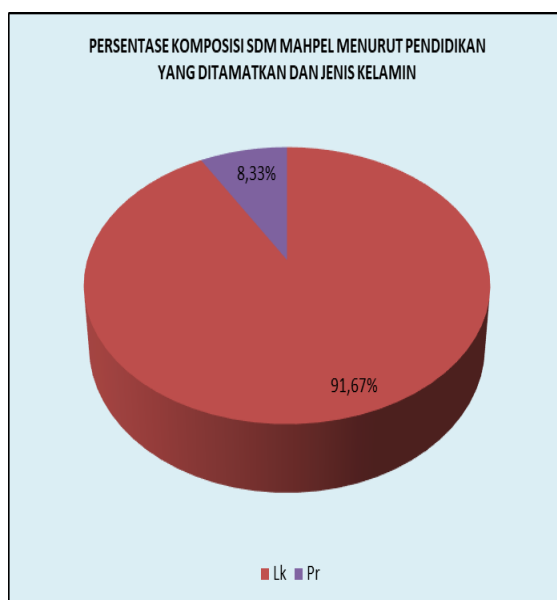
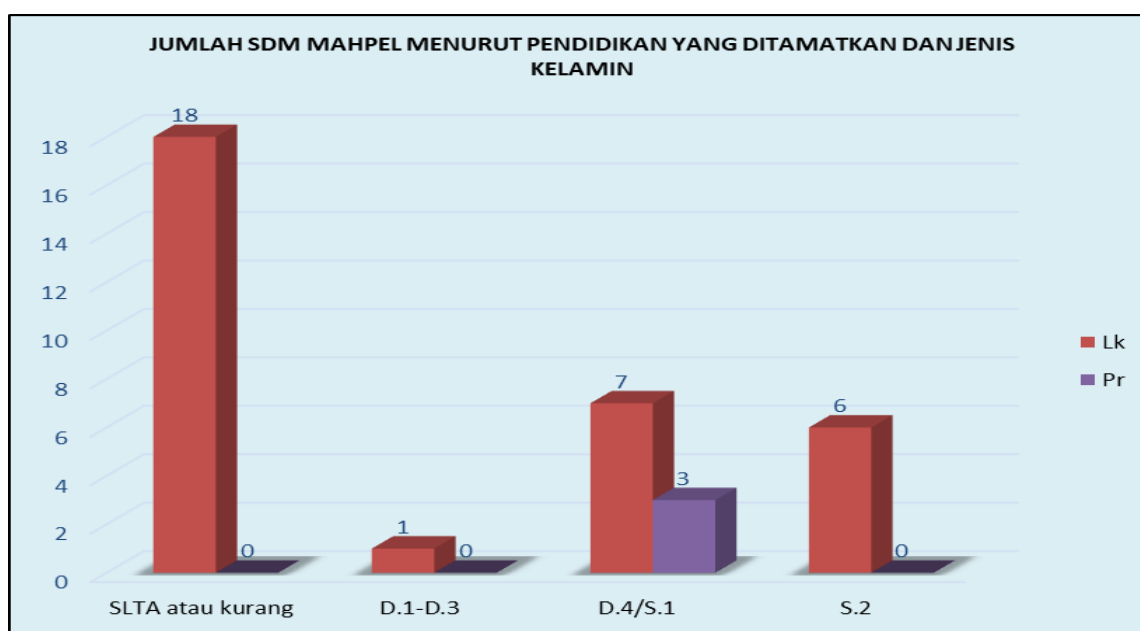
Grafik 1.10. SDM PPNPN Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri
dan Jenis Kelamin



Tabel 1.11. SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah Pegawaiian			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Parisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SLTA atau kurang	18	0	18	100,00	0,00	100,00	54,55	0,00	50,00
2	D.1-D.3	1	0	1	100,00	0,00	100,00	3,03	0,00	2,78
3	D.4/S.1	7	3	10	70,00	30,00	100,00	21,21	100,00	27,78
4	S.2	6	0	6	100,00	0,00	100,00	18,18	0,00	16,67
5	S.3	1	0	1	100,00	0,00	100,00	3,03	0,00	2,78
JUMLAH		33	3	36	91,67	8,33	100,00	100,00	100,00	100,00

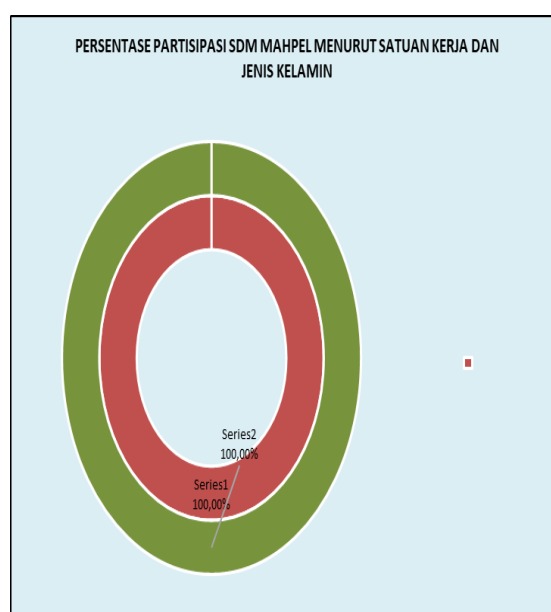
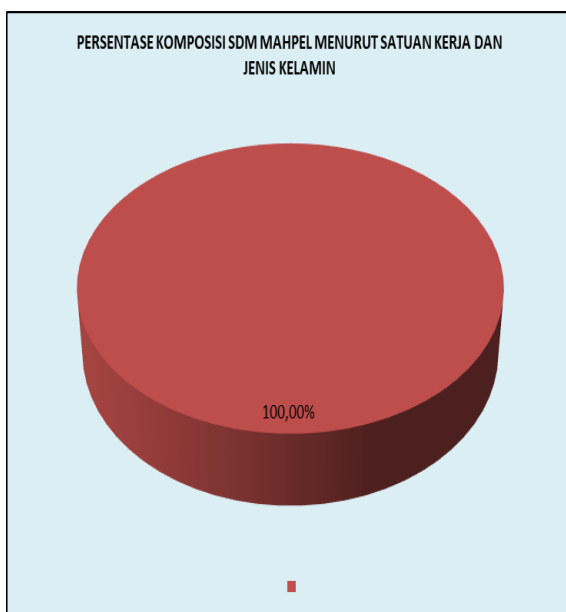
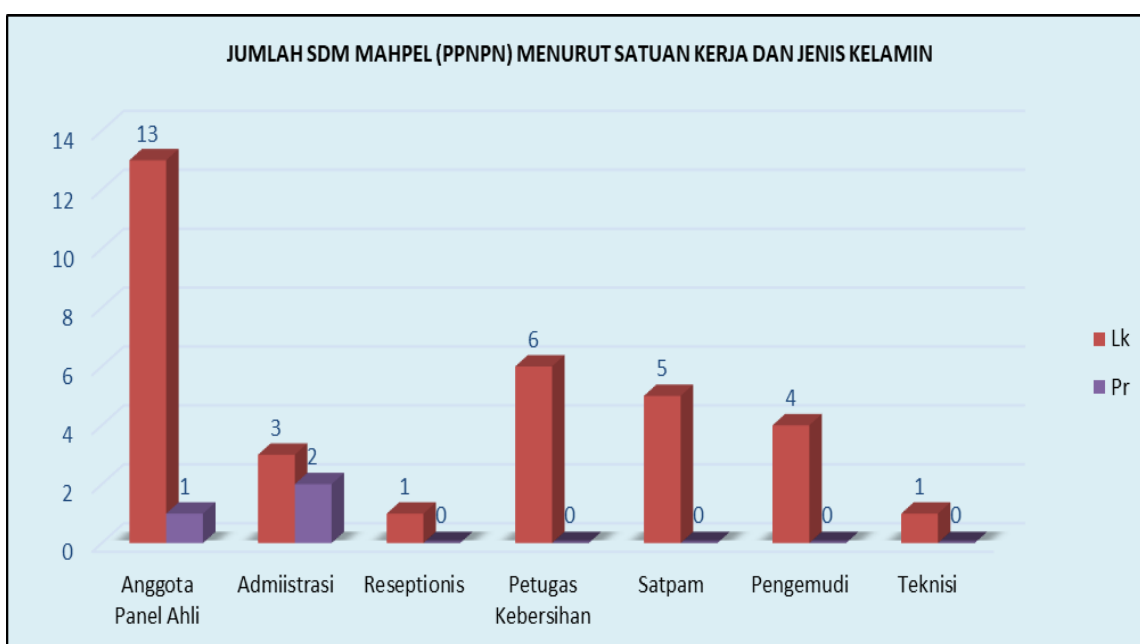
Grafik 1.11. SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin



Tabel 1.12. SDM PPNNP Menurut Satuan Kerja dan Jenis Kelamin

No	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentasi Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	PPNNP Mahkamah Pelayaran							-	-	-
1	Anggota Panel Ahli	13	1	14	92,86	7,14	100,00	39,39	33,33	38,89
2	Admiistrasi	3	2	5	60,00	40,00	100,00	9,09	66,67	13,89
3	Resepionis	1	0	1	100,00	0,00	100,00	3,03	0,00	2,78
4	Petugas Kebersihan	6	0	6	100,00	0,00	100,00	18,18	0,00	16,67
5	Satpam	5	0	5	100,00	0,00	100,00	15,15	0,00	13,89
6	Pengemudi	4	0	4	100,00	0,00	100,00	12,12	0,00	11,11
7	Teknisi	1	0	1	100,00	0,00	100,00	3,03	0,00	2,78
	JUMLAH	33	3	36	91,67	8,33	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 1.12. SDM PPNNP Satuan Kerja dan Jenis Kelamin



D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2020 – 2024. Meningkatnya peran Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan transportasi laut. Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas Mahkamah Pelayaran yaitu melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan fungsi sebagai berikut:

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan penerimaan berkas berita acara pemeriksaan pendahuluan dan tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran selama tahun 2020 – 2024, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

Melaksanakan persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan target waktu yang ditempuh melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait tindak lanjut hasil keputusan sidang.

Melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal secara cepat, tepat dan seadil-adilnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

1. Melaksanakan persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target waktu yang ditempuh melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait tindak lanjut hasil keputusan sidang.

2. Melaksanakan investigasi dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan transportasi secara cepat, tepat dan seadil-adilnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
 - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran berdasarkan kompetensi dibidangnya.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investigasi kecelakaan transportasi sesuai standar yang berlaku.
3. Menyediakan sarana dan prasarana perantara perkantoran yang mendukung dan menjamin kebersihan di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - 1) Peningkatan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta kebersihan di lingkungan kantor Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022.
2. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)
Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022.
3. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran, Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran dengan penekanan kepada arah Kebijakan strategis Mahkamah Pelayaran serta Sistematika Penyajian Laporan Kinerja tahunan yang bersangkutan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencana strategis Mahkamah Pelayaran yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Utama per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran serta ringkasan Perencanaan Kinerja dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 – 2024.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
- 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

6. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 serta saran tindak lanjut/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

7. Lampiran-Lampiran

- a. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- c. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
- d. Rencana Aksi Tahun 2022;



A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran

Rencana strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas

dan fungsi Mahkamah Pelayaran. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Visi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mewujudkan Visi Kementerian Perhubungan Yang Berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.	Terwujudnya penyelenggaraan proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal secara tepat, cepat dan seadil-adilnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak berkaitan dengan keselamatan pelayaran.
Misi	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan. 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor	Menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Panel ahli yang profesional dalam bidangnya secara kualitatif sebagai pembinaan hukum dan

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	Transportasi. 3. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel. 4. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan. 6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan 7. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Budaya Kinerja. 8. Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan. 9. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi. 10. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.	penegakan hukum (<i>Law Enforcement</i>) perkapalan dan pelayaran serta tenaga profesi kepelautan agar angkutan laut di Indonesia dapat terselenggara dengan aman, selamat, lancar dan tertib.
Tujuan	1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi kepada unsur	1) Terlaksananya tindaklanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran oleh Direktur Perkapalan dan

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan indikator indeks profesionalisme asn, indeks merit system, indeks tata kelola manajemen ASN, indeks pengelolaan keuangan, indeks perencanaan, indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan aset. 2. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi birokrasi, dan penguatan bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia secara konsisten di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan indikator indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan, indeks maturitas SPIP, indeks kelembagaan, indeks kepemimpinan perubahan. 3. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi dengan indikator indeks SPBE Kementerian Perhubungan.	Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 2) Penegakan Hukum di bidang keselamatan pelayaran dicapai dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Mahkamah Pelayaran berupa berkas kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Pelayaran yang tepat waktu.

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	4. Mendorong <i>stakeholder</i> dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi dan hasil sidang Mahkamah Pelayaran dalam rangka kualitas manajemen keselamatan transportasi dengan indikator rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti.	
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum diukur dengan indikator: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. 2. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan diukur dengan indikator: Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan indikator:	1. Meningkatkan Peran Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan kapal. 2. Meningkatnya kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. 3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi/desiminasi/seminar/ <i>workshop</i> publikasi tentang keselamatan pelayaran. 4. Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal 5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.	Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi
Indikator	1. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. 2. Penurunan Emisi GRK sektor transportasi. 3. Indeks RB Kementerian Perhubungan.	1. Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan dan Sidang Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dan <i>regulator</i>; 2. Putusan Hukum dibidang Keselamatan Pelayaran

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Selain Renstra dokumen lain atau peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai: sasaran, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Kelima sasaran yang terdapat di dalam Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran tahun 2020 – 2024 pelaksanaannya diwujudkan melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mahkamah Pelayaran yang dijabarkan kedalam 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi;
2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik;

3. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran;
4. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran; dan
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Target Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 secara umum sejalan dengan Target yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tabel RKT 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66
		2)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3)	Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
		4)	Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Pada Area Perubahan	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5)	Jumlah Dokumen Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	6)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5
		7)	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		8)	Jumlah Dokumen Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2
		9)	Dokumen Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	10)	Sosialisasi / <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	%	100
		11)	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2
		12)	Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4
		13)	Pembinaan Pegawai	%	100
		14)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 ini, merupakan bentuk tekad Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan "*Good Governance*" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *service agreement* dan dokumen "kontrak" antara pimpinan unit-unit kerja dengan Pimpinan Mahkamah Pelayaran serta kontrak kinerja Pimpinan Mahkamah Pelayaran dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja ini adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 – 2024 yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Perjanjian Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu defenitif).

Maksud perjanjian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra), maka ditetapkan target kinerja tahunan.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66
		2)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3)	Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
		4)	Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Pada Area Perubahan	%	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5)	Jumlah Dokumen Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan	6)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5
		7)	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100

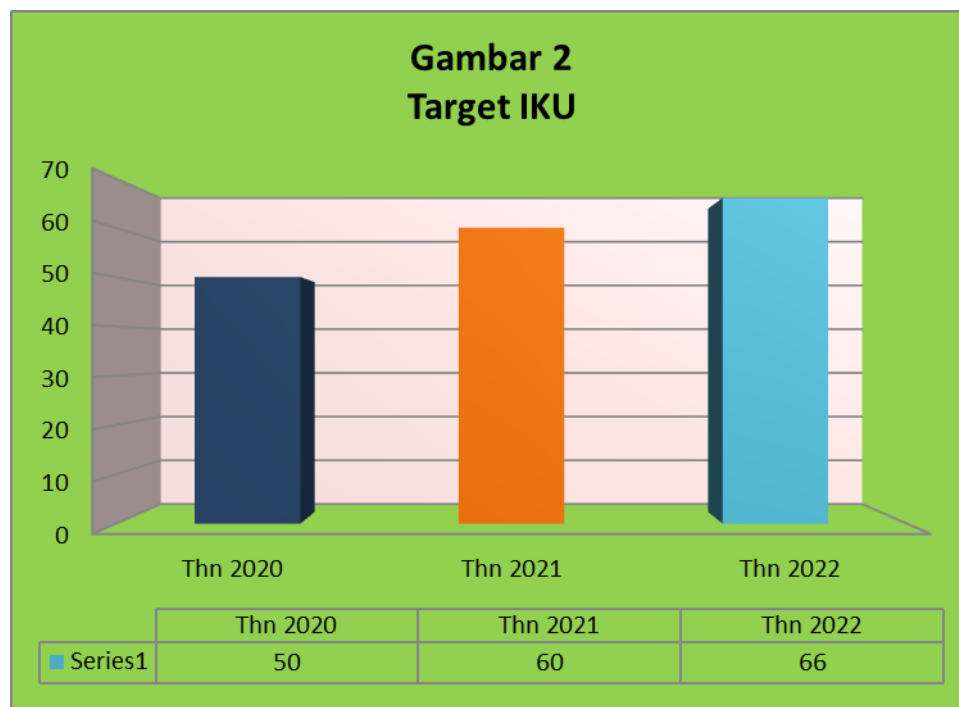
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
	Pengganggaran	8)	Jumlah Dokumen Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2
		9)	Dokumen Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	10)	Sosialisasi / <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	%	100
		11)	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2
		12)	Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4
		13)	Pembinaan Pegawai	%	100
		14)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

Indikator merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi pada masa yang akan datang. Dalam Indikator Kinerja Utama Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 – 2019, sudah tidak relevan lagi, sehingga Indikator utamanya berubah. Adapun Indikator Kinerja Utama lama ini menjelaskan banyaknya jumlah perkara putusan sidang, sedangkan Indikator Kinerja Utama di tahun 2020 – 2024 menjadi Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran.

Tabel 2.3 Target IKU tahun 2020 – 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKU		
		2020	2021	2022
		Target	Target	Target
1.	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	50	60	66

Grafik 2. Target IKU tahun 2020 – 2022



Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2022, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2022

Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	0
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	930.301.000
3.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	2.084.706.000
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	391.909.000
5.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp.	14.041.014.000
TOTAL		Rp.	17.487.930.000



Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui azas pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Untuk mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Pelayaran. Pengukuran kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan tingkat pencapaian target dari rencana capaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dicapai dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala, yaitu bulanan, triwulan dan tahunan. Pedoman yang digunakan dalam capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pendekatan Perencanaan Strategis

Pendekatan perencanaan strategis dilakukan dengan menyelaraskan antara visi dan misi dengan potensi sumber daya, peluang dan kendala intern dan ekstern dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk memudahkan penyusunan rencana strategis, digunakan alat bantu berupa formulir Rencana Strategis yang dimuat dalam dokumen RENSTRA. Dalam Rencana Strategis dimuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Pendekatan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tindakan/kegiatan tahunan, yang merupakan penajaman untuk mengoperasionalkan rencana strategis yang disusun seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran. Untuk memudahkan penyusunan rencana kinerja tahunan digunakan alat bantu berupa Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran dilakukan terhadap nilai rata-rata capaian indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output). Pengukuran kinerja kegiatan ini merupakan dasar pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan program, karena penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Persentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan persentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan persentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pencapaian Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2022 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2022				Total	Capaian (%)
					Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66	100				100	152
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	3,33	30	20	16,67	70	70
Rata-Rata Capaian Sasaran										222
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	5	45	30	20	100	100
		4) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100			90,50		90,50	90,50
Rata-Rata Capaian Sasaran										190,50
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1				1	1	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										100
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	6) Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH & SPIP	Dokumen	5	2	3			5	100
		7) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	21,01	29,18	25,04	24,54	99,77	99,77
		8) Barang Milik Negara yang terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2		1		1	2	100
		9) Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1				1	1	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										299,77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2022				Total	Capaian (%)
					Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	60	125			185	185
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2				2	2	100
		12) Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4				4	4	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	100				100	100	100
		14) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100		60		40	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran									585	

II. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	60	83	138,83	66	100	152
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	6,25	6,25	100	70	70
Rata-rata Capaian Sasaran				145,08			222		
2)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Index	3,01	3,25	107,97	Beubah penempatan SS		
		3) Jumlah keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	100	100	100
		4) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	Belum ada di RO tahun 2021			100	90,50	90,50
		4) Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100	100	100	Perubahan di Aplikasi sehingga statistik data yg mengakses sdh tdk ada		
Rata-rata Capaian Sasaran				307,97			190,50		
3)	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Jumlah Dokumen Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Dokumen	4	3	75	Perubahan karena sudah tidak ada di RO		
		5) Regulasi Hukum Pada Dokumen Kajian Kelembagaan Mahkamah Pelayaran di bidang transportasi berbasis pelayaran	Dokumen	1	1	100	1	1	100
fRata-rata Capaian Sasaran				175			100		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
4)	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	6) Jumlah Dokumen LAKIP, RENSTRA, PK, SPIP dan LAPTAH	Dokumen	1	1	100	5	5	100
		7) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	98,26	98,26	100	99,77	99,77
		8) Jumlah dokumen barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	1	1	100	2	2	100
		9) Jumlah Dokumen Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Rata-rata Capaian Sasaran				398,26			399,77		
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / seminar / workshop / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	100	100	100	185	185
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	1	1	100	2	2	100
		12) Kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Manajemen Pegawai Mahkamah Pelayaran	Dokumen	1	1	100	4	4	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	Belum ada di RO tahun 2021			100	100	100
		14) Pembinaan Administrai Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				400			585		

III. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Tabel. 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66	100	152
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	70	70
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		4) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	90,50	90,50
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	6) Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH & SPIP	Dokumen	5	5	100
		7) Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	99,77	99,77
		8) Jumlah dokumen barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2	2	100
		9) Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1	1	100
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	185	185
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2	2	100
		12) Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4	4	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	100	100	100
		14) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100

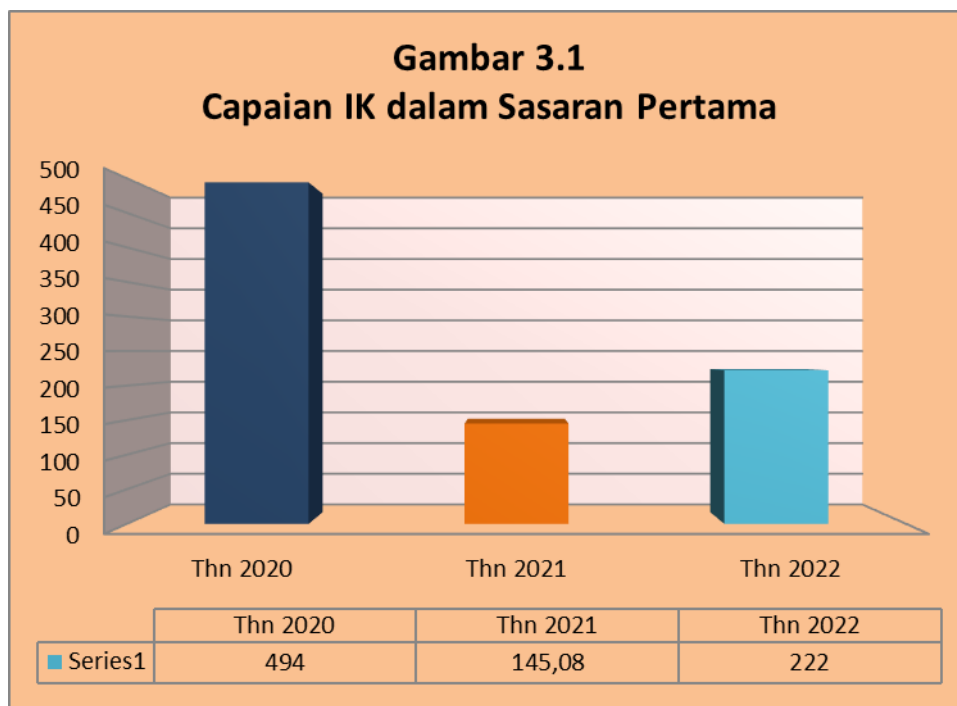
IV. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. **Sasaran pertama adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”**

Sasaran ini dicapai melalui satu program yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran yaitu Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Pelayaran.

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2022, guna mencapai indikator kinerja dari sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran;
- 2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu.

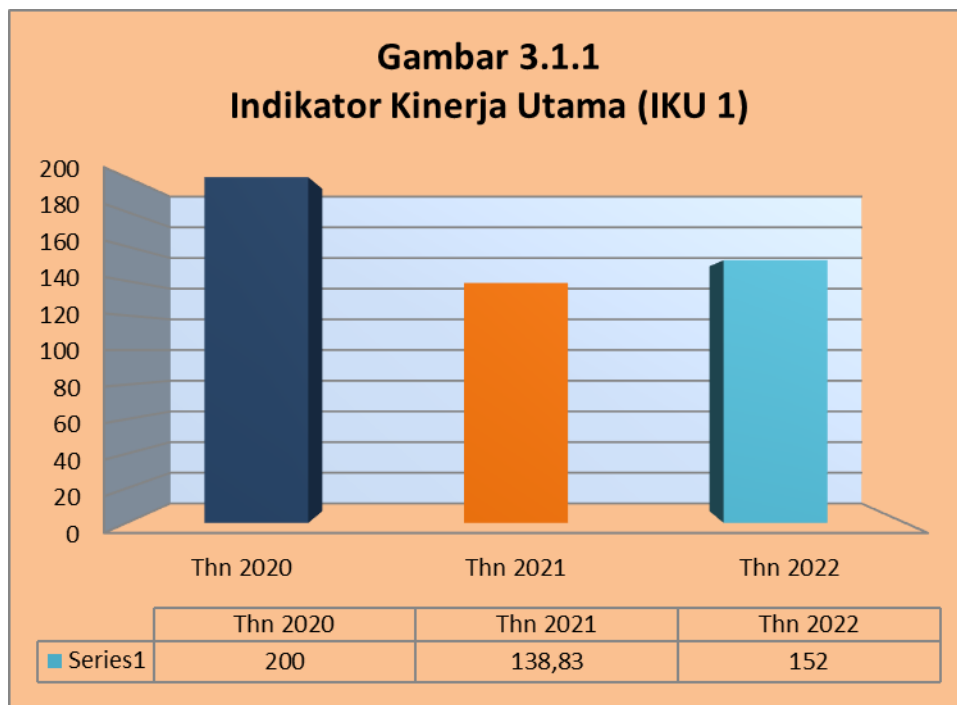


Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 target Indikator Kinerja Utama Mahkamah Pelayaran adalah Banyaknya Putusan Mahkamah Pelayaran.

Sedangkan terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, target Indikator Kinerja Utama berubah menjadi Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran

Pada sasaran strategis tahun 2022, rata-rata capaian sasaran mencapai 222, perubahan ini di karenakan adanya target indikator kinerja pada sasaran strategis 2022 yang meningkat.

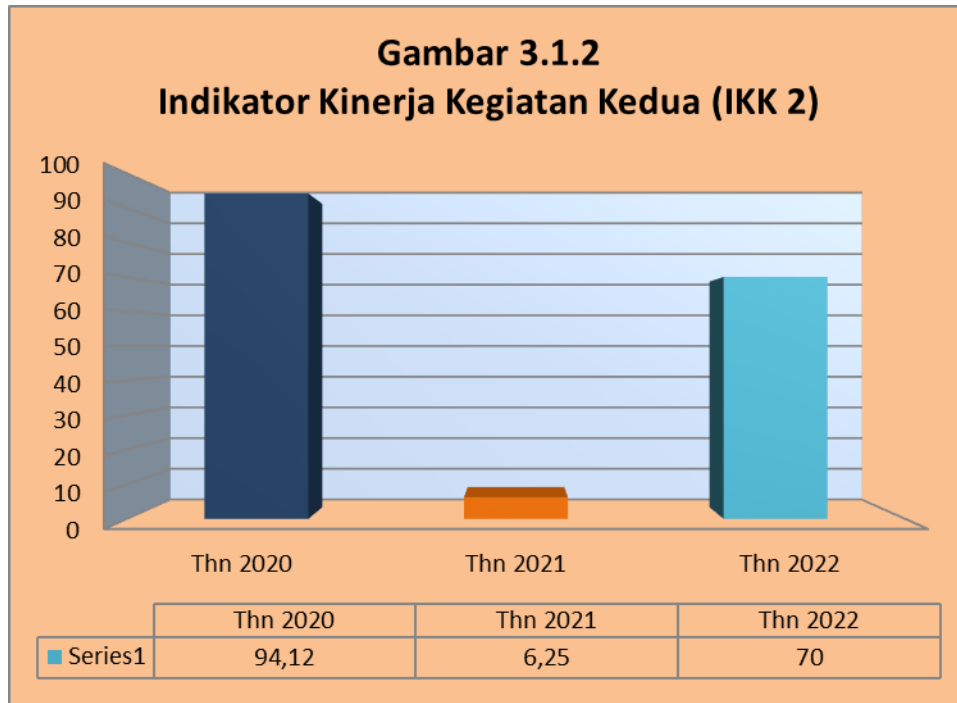
- 1) Pada Indikator Kinerja “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 66%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 152%. Pagu anggaran semula Rp. 120.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 105.049.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 105.048.407, sisa anggaran 593, dengan persentase 100%.



Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama ini, diambil dari Keputusan Mahkamah Pelayaran atas Penjatuhan sanksi administratif kepada nahkoda atau pemimpin kapal dan atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Target kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2022 adalah 66% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 152%. Berdasarkan capaian indikator dimaksud dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2022. Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara Mahkamah Pelayaran dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terkait tindaklanjut dari Keputusan Mahkamah Pelayaran.

2) Pada Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 70% dan capaian kinerja 70%. Pagu anggaran semula Rp. 1.000.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 712.689.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 697.409.267, sisa anggaran 15.279.733, dengan persentase 97,86%



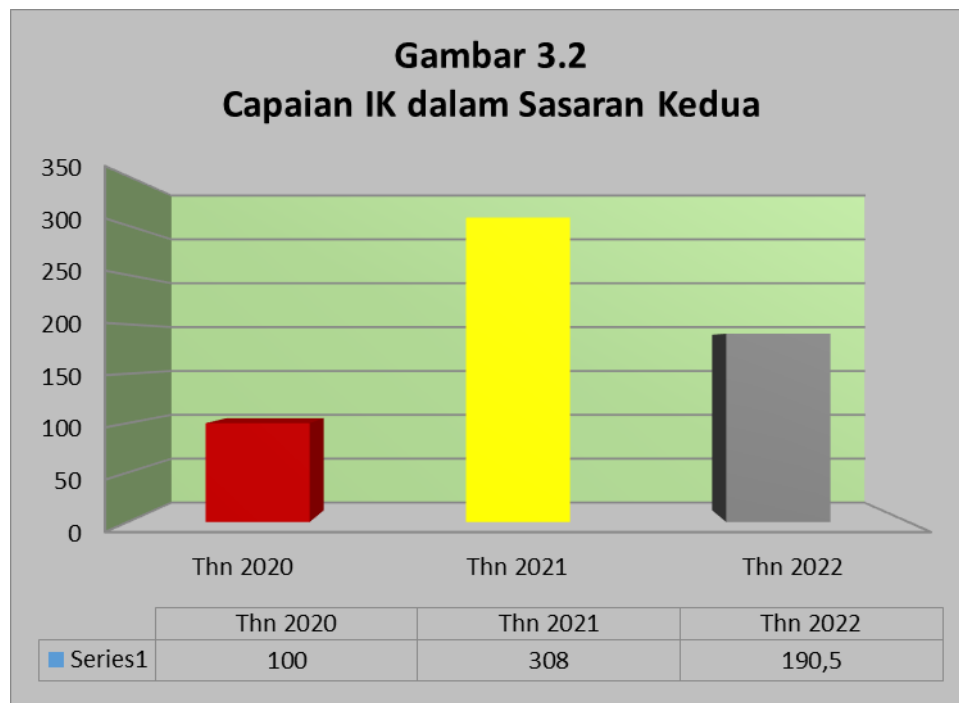
Pada Indikator Kinerja ini target dalam 1 tahun ada 30 tetapi putusan yang tercapai hanya 21 yang tepat waktu, sehingga perolehannya hanya 70%. Ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Adanya penghematan Anggaran;
2. Masih terjadinya Pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan menjadi terhambat untuk dilaksanakan;
3. Masih kurangnya SDM Anggota Panel Ahli dalam menangani kasus pemeriksaan kecelakaan kapal, baru ada 14 orang, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2019 anggota panel ahli berjumlah 20 orang, sehingga tidak memadai dengan berkas BAPP yang masuk dan harus diproses;
4. Adanya kekosongan Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran dari tanggal 1 Juli s.d 15 Agustus 2022;

b. **Sasaran kedua adalah** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”.

Indikator Kinerja pada sasaran yang kedua adalah sebagai berikut :

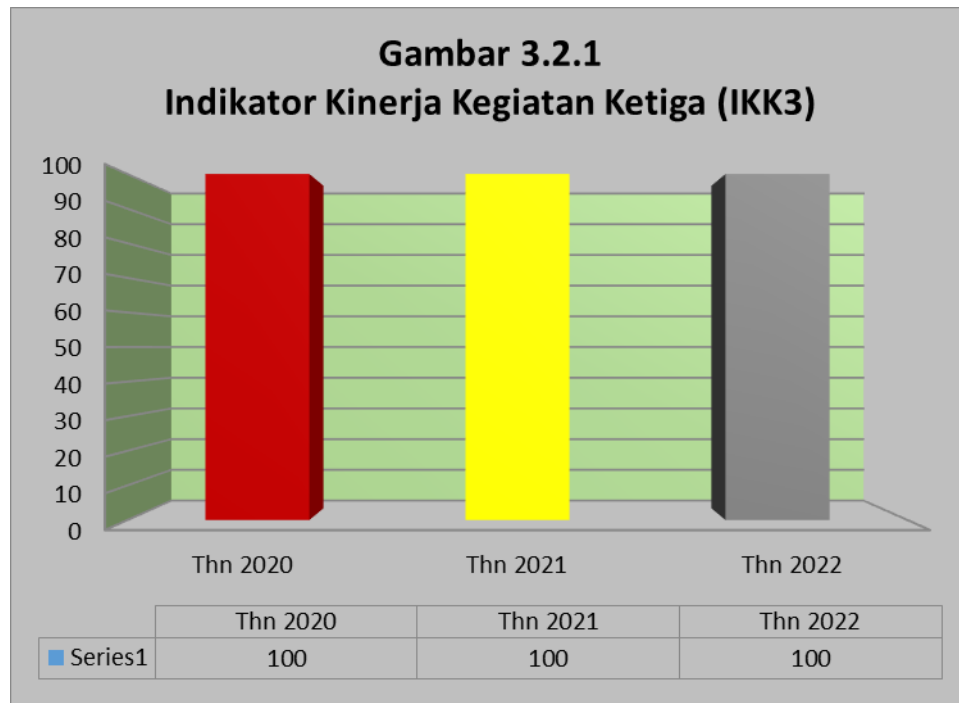
- 1) Jumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran.
- 2) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan



Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Tata kelola yang baik memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta tersertifikasi internasional untuk mengelola potensi sumber daya yang ada.

Pada sasaran strategis ini, rata-rata capaian sasaran sebesar 190,5, perubahan ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran strategis 2022.

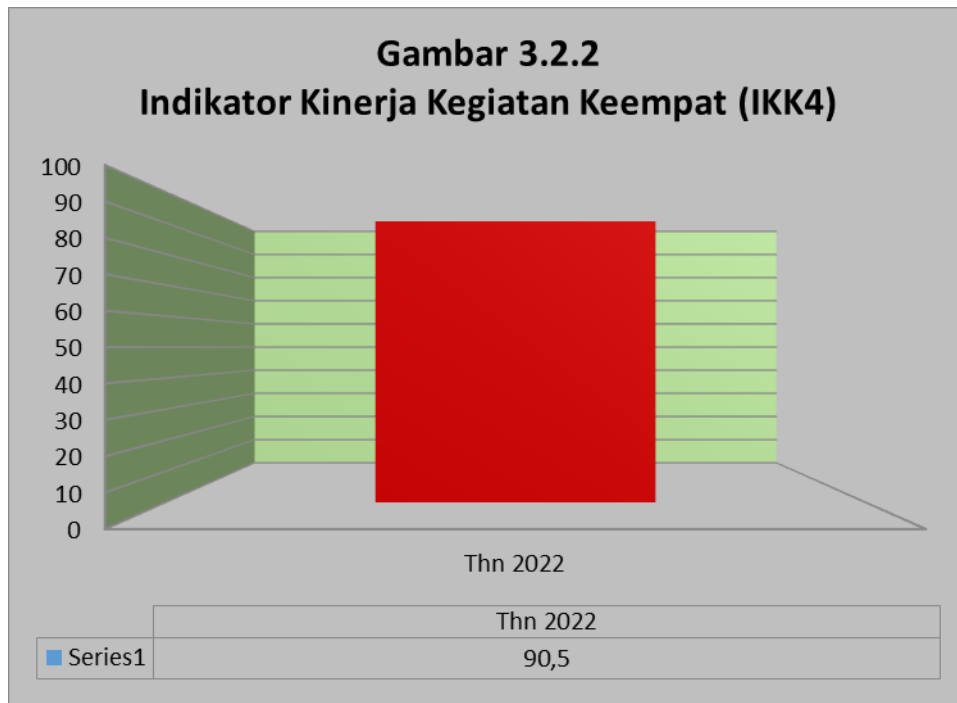
- 1) Pada Indikator Kinerja “Jumlah Keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%. Pagu anggaran semula Rp. 70.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 9.721.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 9.718.995, sisa anggaran 2.005, dengan persentase 99,98%.



Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat yang memerlukan informasi terkait proses pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dalam hal ini berupa penyelesaian perkara kecelakaan melalui Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan jumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran sebagai bentuk media informasi tentang proses penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran dengan prosentase realisasi 100%. Adapun berita yang tersaji di website Mahkamah Pelayaran pada tahun 2022 sebanyak 20.

Data yang mengakses publik baik dari nasional maupun mancanegara untuk melihat dan mendapatkan informasi dalam website Mahkamah Pelayaran, berupa Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran dan kegiatan2 yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online melalui website Mahkamah Pelayaran (mahpel.dephub.go.id/web/).

2) Pada Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan” Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 90,50% dan capaian kinerja 90,50%. Pagu anggaran yang semula Rp. 85.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 78.940.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 78.940.000, dengan persentase 100%.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya dalam melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini diarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan berorientasi untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Terdapat 3 (tiga) target utama yang hendak dicapai, yakni :

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
2. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
3. Peningkatan pelayanan publik.

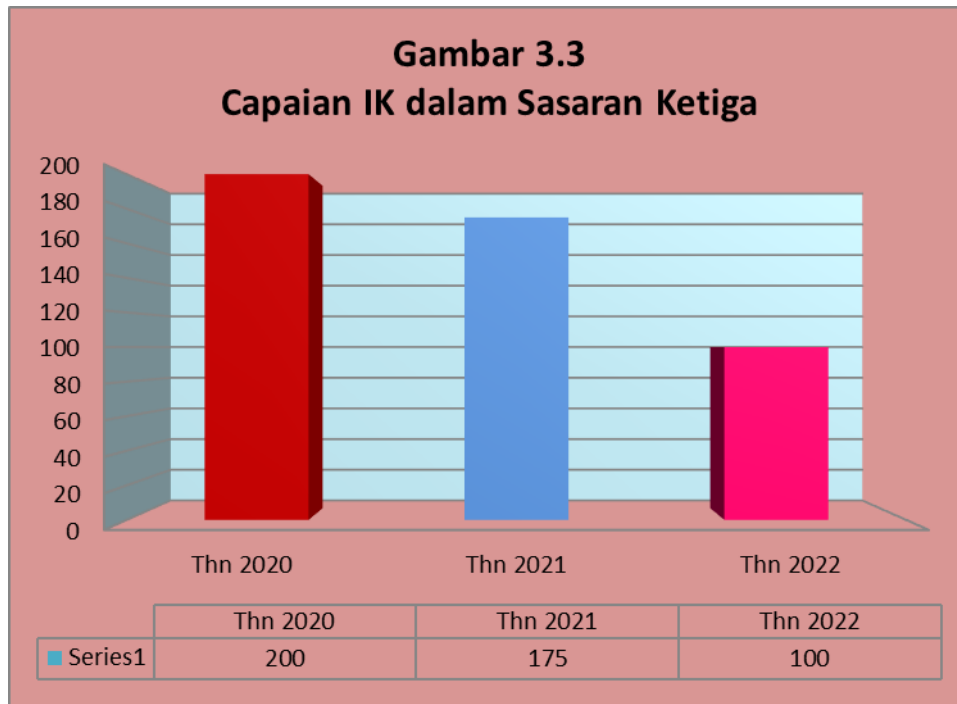
Implementasi nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan dilaksanakannya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 yaitu penataan pada 6 area perubahan yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan,
2. Penataan Tata Laksana,
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
4. Penguatan Akuntabilitas,
5. Penguatan Pengawasan dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun predikat Zona Integritas (ZI) nantinya akan diberikan kepada unit kerja pemerintah yang berkomitmen menjalankan 6 area perubahan tersebut dalam meraih WBK/WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi terhadap Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras (PMPRB) mencapai 90,50%.

- c. **Sasaran ketiga adalah** “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”.

Indikator Kinerja pada sasaran yang ketiga adalah Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran.

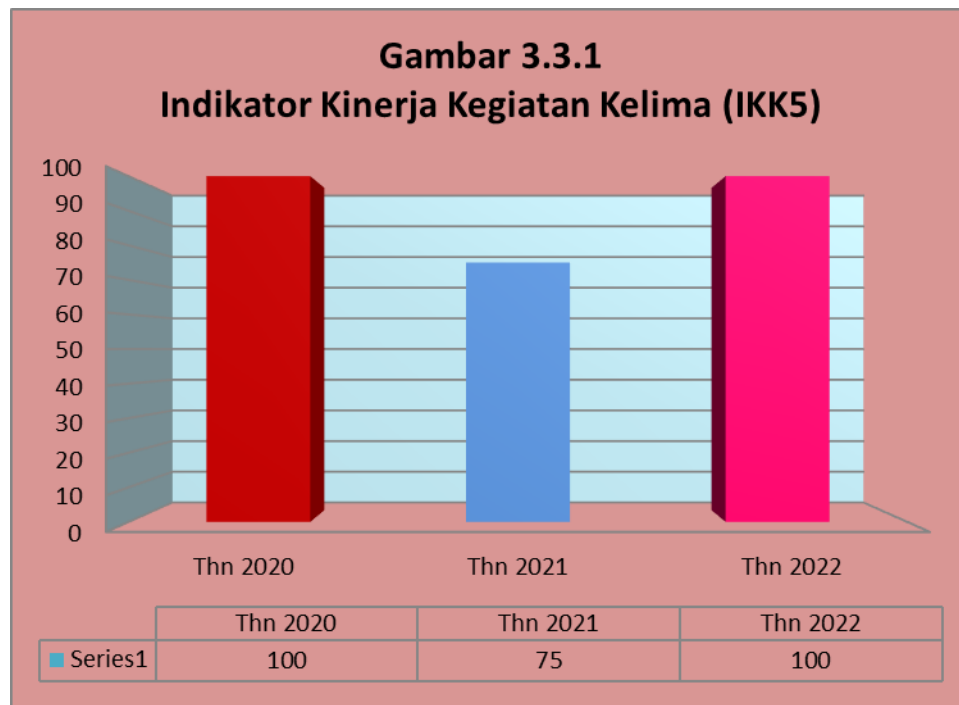


Yurisdiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah “Mahkamah” atau quasi peradilan dalam perkara kecelakaan kapal, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Peningkatan peran Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia khususnya, dan umumnya sebagai sumbangan bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya.

(1) Pada Indikator Kinerja “Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 1 Peraturan dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

Pagu anggaran semula Rp. 120.000.000 direvisi menjadi Rp. 0, dan persentase 0%



Untuk meningkatkan kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja lainnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau Rancangan Peraturan Lainnya sebagai Indikator untuk mencapai sasaran ini.

Capaian kinerja didapat dari telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

d. **Sasaran keempat adalah** “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran”

Indikator Kinerja pada sasaran yang keempat adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH dan SPIP.
- 2) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran.
- 3) Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN
- 4) Data Statistik Kecelakaan Kapal



Sasaran ini dicapai melalui Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ketersediaan dan kompetensi pegawai merupakan hal yang perlu dipenuhi agar proses kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

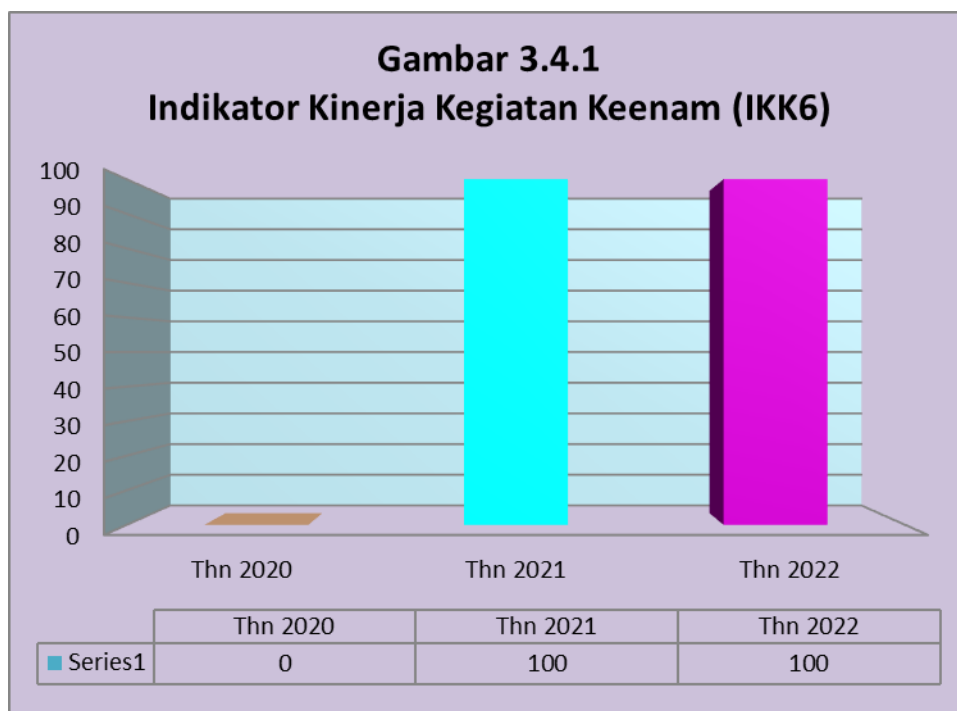
Analisis tingkat kecukupan pegawai bertujuan untuk mengetahui tingkat produktifitas dan kinerja pegawai.

Pada sasaran strategis tahun 2022, rata-rata capaian sasaran kinerja 399,27, perubahan ini dikarenakan adanya perubahan indicator kinerja pada sasaran strategis 2022.

- 2) Pada Indikator Kinerja “Penyusunan Dokumen Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH dan SPIP.”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 5 dengan realisasi 5 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

Pagu anggaran dari masing-masing kegiatan, yaitu

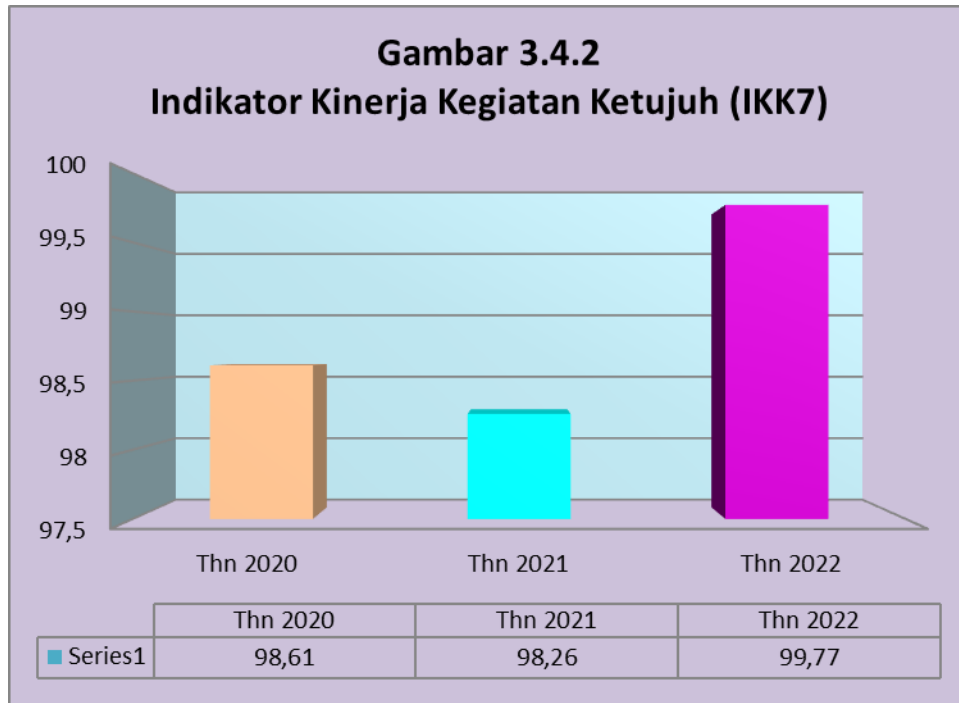
- a. Kegiatan Renstra, pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 69,462,000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 69,092,000, sisa anggaran 370,000, dengan persentase 99,47%
- b. Kegiatan Perjanjian Kinerja (PK), pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 45.006.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 45.000.000, sisa anggaran 6.000, dengan persentase 99,99%
- c. Kegiatan LAKIP, pagu awal semula Rp. 110.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 97,253,000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 95,990,000, sisa anggaran 1,263,000, dengan persentase 98,70%
- d. Kegiatan LAPTAH, pagu awal semula Rp. 80.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 54.786.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.780.000, sisa anggaran 6.000, dengan persentase 99,99%
- e. Kegiatan SPIP, pagu awal semula Rp. 80.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 61,001,000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 61,000,000, sisa anggaran 1.000, dengan persentase 100%



Capaian sasaran kinerja ini adalah :

- a. Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra tahun 2022 ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022
- b. Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini disusun sebanyak 3x, perubahan yang ke 2 dikarenakan adanya pergantian pejabat struktural dan perubahan yang ke 3 dikarenakan adanya pergeseran anggaran karena *Automatic Adjustment* (AA)
- c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 telah disusun pada bulan Januari 2023.
- d. Penyusunan Laporan Tahunan 2022, telah disusun pada bulan Januari 2023
- e. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.0903/LHP-206/D103/2/2022 tanggal 30 Desember 2022 bahwa nilai Maturitas SPIP adalah 3,474, dengan Manajemen Resiko Indeks (MRI) berada pada level 3, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,07 dan Kapabilitas APIP level 3. Mahkamah Pelayaran mendapatkan nilai 3,29 dengan maturitas Penyelenggaran SPIP pada Level **3 (Terdefinisi)**.

- 2) Pada Indikator Kinerja “Persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 99,77% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 99,77%. Pagu anggaran semula Rp. 142.500.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 124.650.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 124.650.000, sisa anggaran 0 dengan persentase 100%.



Tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Pelayaran pada tahun 2022 sebesar 99,77%. Dari target pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 17.487.930.000, terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 7,910,596,000,-
- Belanja Barang : Rp. 9,032,981,000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 544,353,000,-

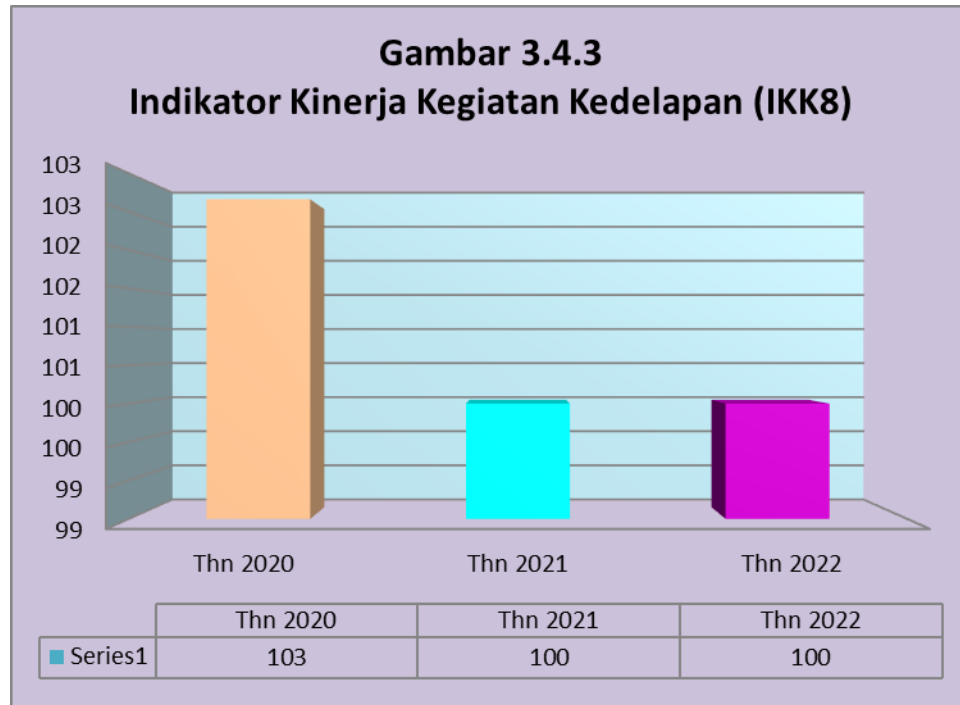
Realisasinya sebesar Rp. 17.449.583.178, dengan perincian :

- Belanja Pegawai : Rp. 7.910.400.310,-
- Belanja Barang : Rp. 8.993.595.467,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 544.352.217,-

Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 39.582.002, dengan perincian :.

- Belanja Pegawai : Rp. 195.690,-
- Belanja Barang : Rp. 39.385.533,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 783,-

- 3) Pada Indikator Kinerja “Dokumen barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 2 dengan realisasi 2 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu anggaran semula Rp. 220.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 211.515.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 211.513.372, sisa anggaran 1.628 dengan persentase 100%



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

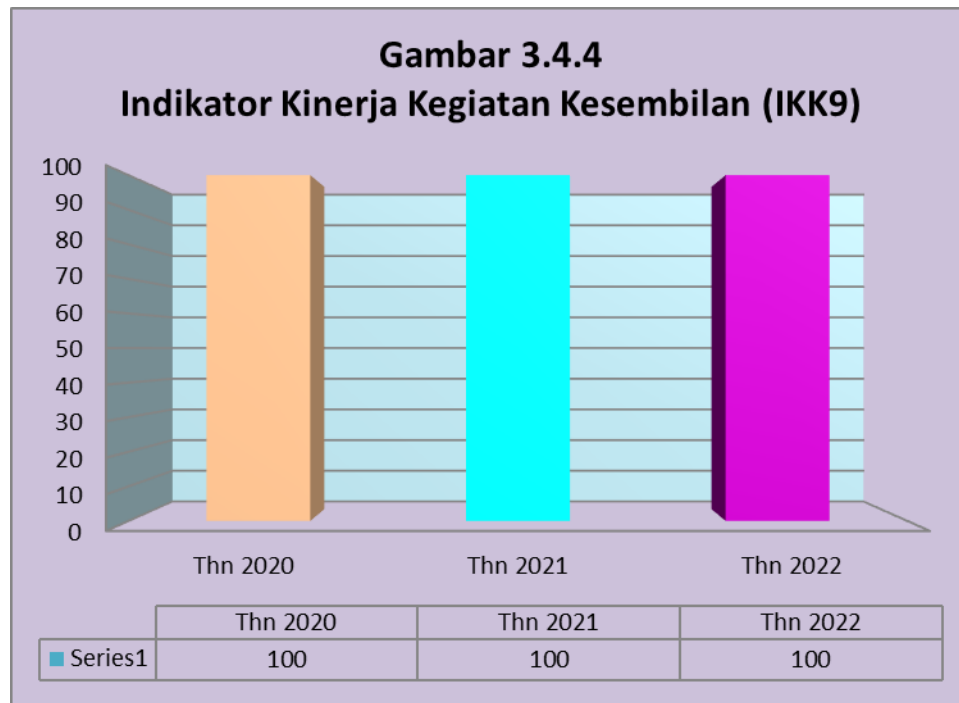
Tanggal : 09-01-2023
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LBNST

NAMA UAKPB : 022.01.0199.412622 - MAHKAMAH PELAYARAN

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	U R A I A N	
131111	Tanah	54,746,028,500
132111	Peralatan dan Mesin	20,079,474,572
133111	Gedung dan Bangunan	8,844,589,463
134111	Jalan dan Jembatan	44,453,000
134112	Irigasi	60,219,000
134113	Jaringan	1,913,600,000
135121	Aset Tetap Lainnya	640,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18,743,398,399)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(924,266,478)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(26,288,274)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6,798,918)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(478,685,000)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	198,290,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	270,283,600
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(91,896,424)
J U M L A H		65,884,244,642

Penanggung Jawab UAKPB

- 4) Pada Indikator Kinerja “Data Statistik Kecelakaan Kapal”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.. Pagu anggaran yang semula Rp. 120.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 106.953.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 106.952.247, sisa anggaran 753 dengan persentase 100%



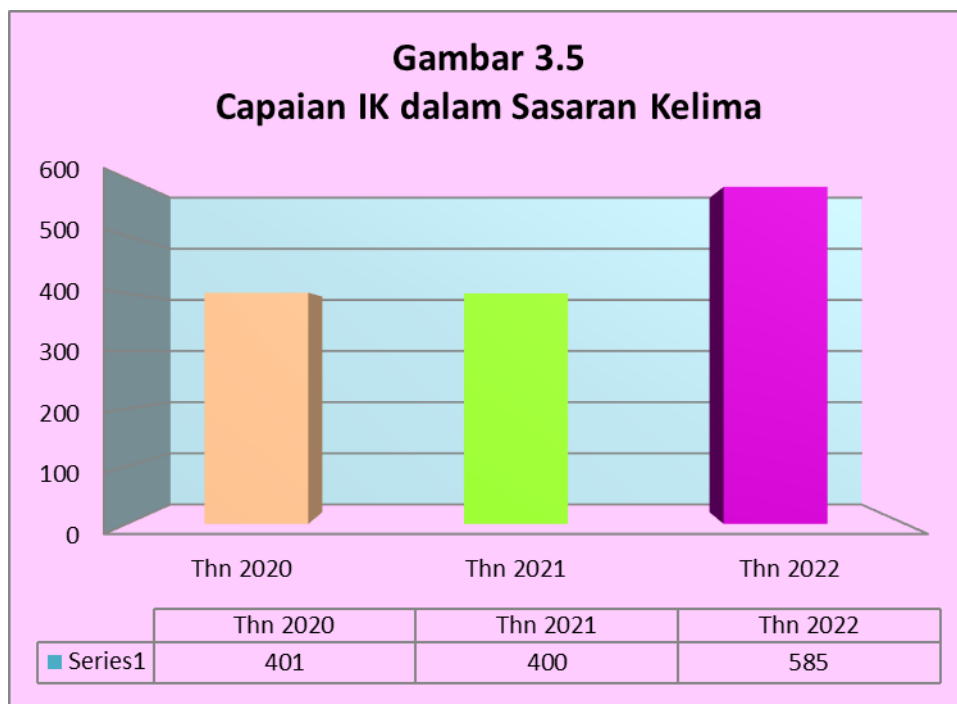
Salah satu komponen strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi dari program adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang ada merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi.

Melaksanakan penyusunan statistik kecelakaan kapal sebagai bentuk penyajian data kecelakaan kapal yang diproses oleh Mahkamah Pelayaran di tahun 2022. Sebagai indikatornya adalah jumlah laporan statistik kapal. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyusunan data statistik kecelakaan kapal berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran. Kegiatan ini mempunyai target capaian 1 (satu) laporan dokumen.

e. Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran”

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 5 (lima) Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD).
- 2) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP).
- 3) Pengembangan kompetensi SDM.
- 4) Pembinaan Pegawai.
- 5) Pembinaan Administrasi Kepegawaian

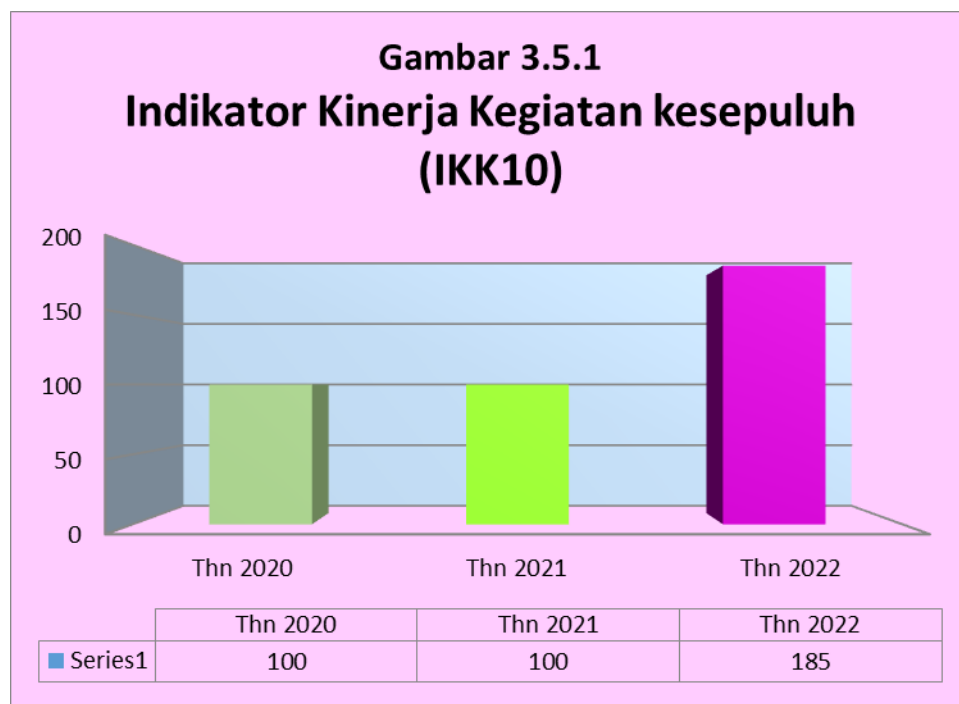


Pada sasaran strategis tahun 2022, rata-rata capaian sasaran kinerja 585, perubahan ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran kinerja 2022

- 1) Pada Indikator Kinerja “Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)” Target kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi 185% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 185%.

Pagu anggaran dari masing-masing kegiatan, yaitu

- a. Kegiatan Sosialisasi, pagu awal semula Rp. 120.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 179.520.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 179.519.446, sisa anggaran 554, dengan persentase 100%
- b. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD), pagu awal semula Rp. 65.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 37.790.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 37.789.700, sisa anggaran 300, dengan persentase 100%

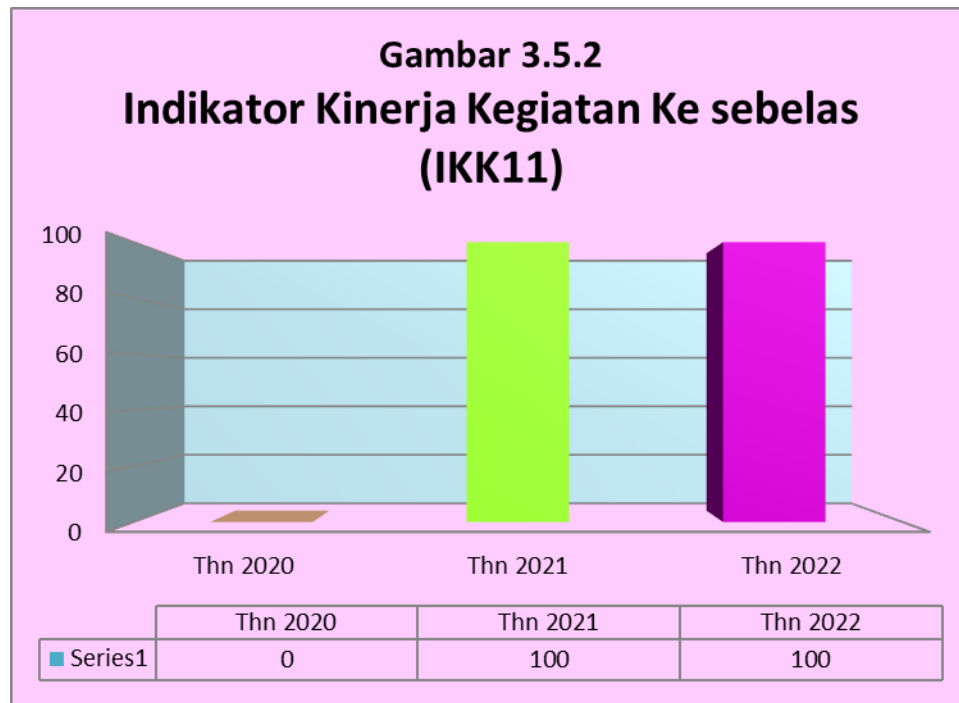


- Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi pemeriksaan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran dan Peningkatan Keselamatan Pelayaran, mengusung Tema “Tindak Lanjut dan Implementasi Pemeriksaan Kapal di Mahkamah Pelayaran” dan “Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Keputusan dan Pembuatan BAPP Mahkamah Pelayaran” dilaksanakan di 2 (dua) zona wilayah di Indonesia, yang pertama wilayah zona timur, pada tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Provinsi Bali, mengundang UPT wilayah Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Maluku dan Papua dan pelaksanaan yang kedua meliputi wilayah zona barat, di selenggarakan pada tanggal 29 Juni 2022 di Hotel The Alts Palembang

Provinsi Sumatera Selatan dengan mengundang UPT di seluruh wilayah barat Sumatera. Kegiatan Sosialisasi dibuka resmi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Ketua Mahkamah Pelayaran, Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.H. Kegiatan Sosialisasi di Bali dihadiri oleh ± 75 (Tujuh Puluh Lima) orang peserta, sedangkan di Palembang di hadiri ± 50 (lima Puluh) orang peserta.

- Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022, dengan acara **Focus Grup Discussion (FGD) Tata Cara Pembuatan Keputusan Sidang dan Peradilan Tata Usaha Negara**, dengan Narasumber Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M. Hum (Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI), dengan tema “Kedudukan dan Peran Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, sedangkan Narasumber kedua adalah Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.Hum (Staf Khusus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia), mengambil tema “Kaidah Hukum dalam Pembuatan Penetapan Putusan Sela dan Putusan”. Kegiatan FGD ini di hadiri sebanyak ± 60 (enam puluh) orang peserta.

2) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 2 dengan realisasi 2 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu awal semula Rp. 80.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 143.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 142.478.275, sisa anggaran Rp. 521.725 dengan persentase 99,64%.



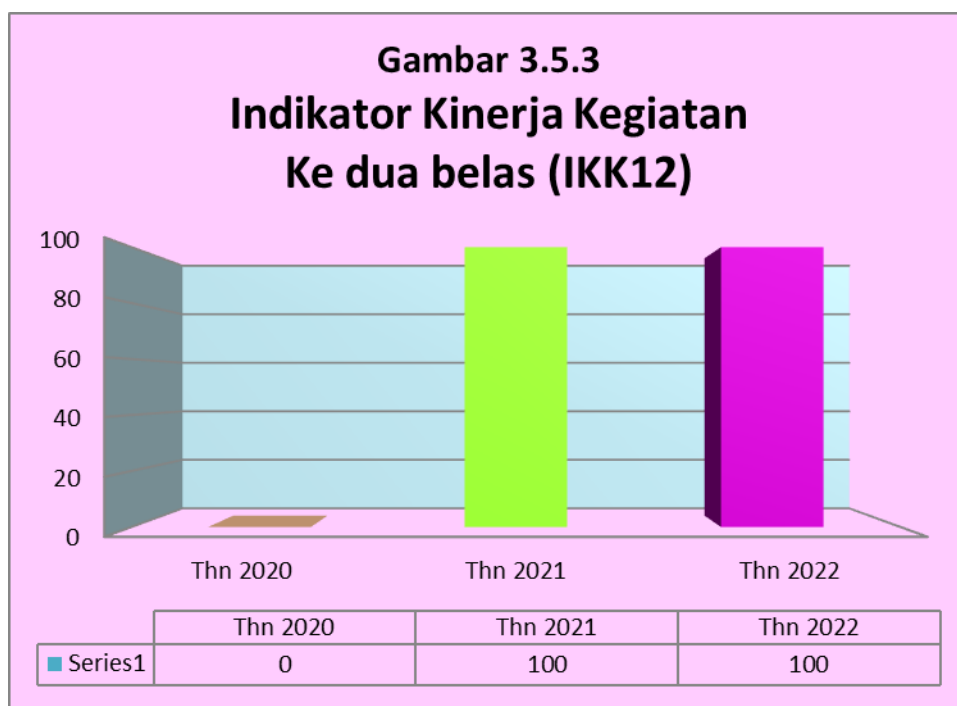
Pada kinerja ini semua sesuai dengan aturan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM 41 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Perhubungan.

Capaian Kinerja Mahkamah Pelayaran mendapatkan penilaian dari Audit Internal Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Biro Umum selaku unit Pembina Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebesar **86 (Memuaskan)**

3) Pada Indikator Kinerja “Pengembangan kompetensi SDM”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 4 dengan realisasi 4 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

Pagu anggaran dari masing-masing kegiatan, yaitu

- a. Kegiatan Pemantapan Pegawai, pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 32.400.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 32.400.000, sisa anggaran Rp. 0, dengan persentase 100%
- b. Kegiatan Pengembangan, Kompetensi & peningkatan SDM Mahpel, pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 6.500.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.500.000, sisa anggaran Rp. 0, dengan persentase 100%
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perkara, pagu awal semula Rp. 65.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 48.528.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 48.528.000, sisa anggaran Rp. 0, dengan persentase 100%
- d. Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan, pagu awal semula Rp. 65.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 11.110.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 11.110.000, sisa anggaran Rp. 0, dengan persentase 100%

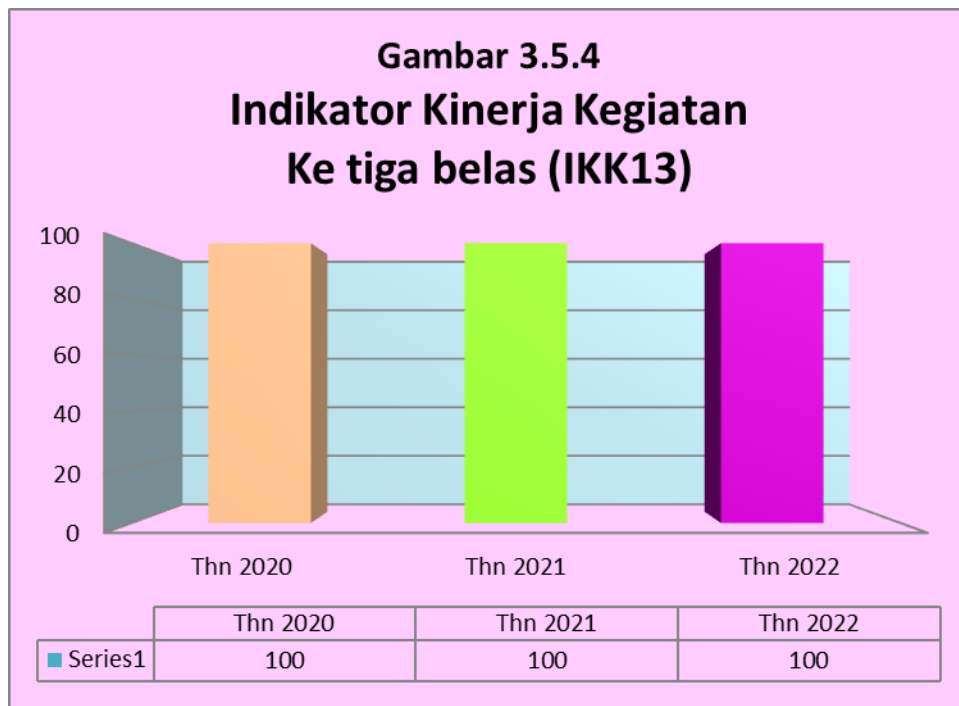


- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pemicu untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi dibidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu membuat/merancang program untuk pembangunan terkhusus sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam peningkatan pelayanan baik yang bersifat internal maupun pelayanan yang bersifat eksternal. Ketika menjadi bagian dari organisasi, di institusi pemerintahan, setiap individu adalah sumber daya manusia (SDM) yang memberikan kontribusi. Untuk memberikan kontribusi terbaik, pemantapan profesi dan pengembangan diri menjadi penting. Untuk itu Pemantapan Pegawai dapat diperlukan agar etos kerja dan keahlian dari para pegawai menjadi profesional. Sejalan dengan upaya pemerintah akan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional tentunya diperlukan pemikiran bersama. Dalam upaya itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama, adalah beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain dapat melalui Pendidikan dan pelatihan, Pembelajaran langsung ditempat bekerja secara informal, maupun melalui upaya Mandiri, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat upaya peningkatan Kompetensi bagi seorang PNS sangat mustahil kalau tidak melakukan transfer *knowledge* yang baik dan benar sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan saat ini, baik dari segi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasannya serta evaluasi.
- b. Pengembangan kompetensi dan peningkatan manajemen pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi

organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job training* dan *on the job training*. *Off the job training* yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan *on the job training* adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuaikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. Ada sekitar 7 orang yang mengikuti pengembangan SDM.

- c. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perkara, dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 1-2 Maret 2022, dengan Narasumber Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.Hum (Staf Khusus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia), dengan tema **“Kaidah Hukum dalam Pembuatan Keputusan Mahkamah Pelayaran”**, dan yang hadir sekitar ± 30 orang.
- d. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan dilaksanakan pada tanggal 05 April 2022. Kegiatan Bimbingan Teknis Perjalanan Dinas bagi Pegawai Mahkamah Pelayaran melalui *Zoom Meeting* di Jakarta, Kantor Mahkamah Pelayaran, dikarenakan Anggaran Bimtek tersebut dialokasikan untuk memenuhi blokir AA jilid 2. Kegiatan Bimtek tersebut dimulai pukul 14.00 WIB, yang di buka oleh Ibu Sri Lestari Rahayu, SH., LL.M. selaku Ketua Mahkamah Pelayaran dan dihadiri oleh para pegawai Mahkamah Pelayaran dengan Narasumber Sudharso Abdhi dari Inspektorat IV Itjen Kemenhub dengan tema **“Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap”**, dan yang hadir sekitar ± 30 orang

- 4) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Pegawai”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 56.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 56.000.000, sisa anggaran Rp. 0 dengan persentase 100%.

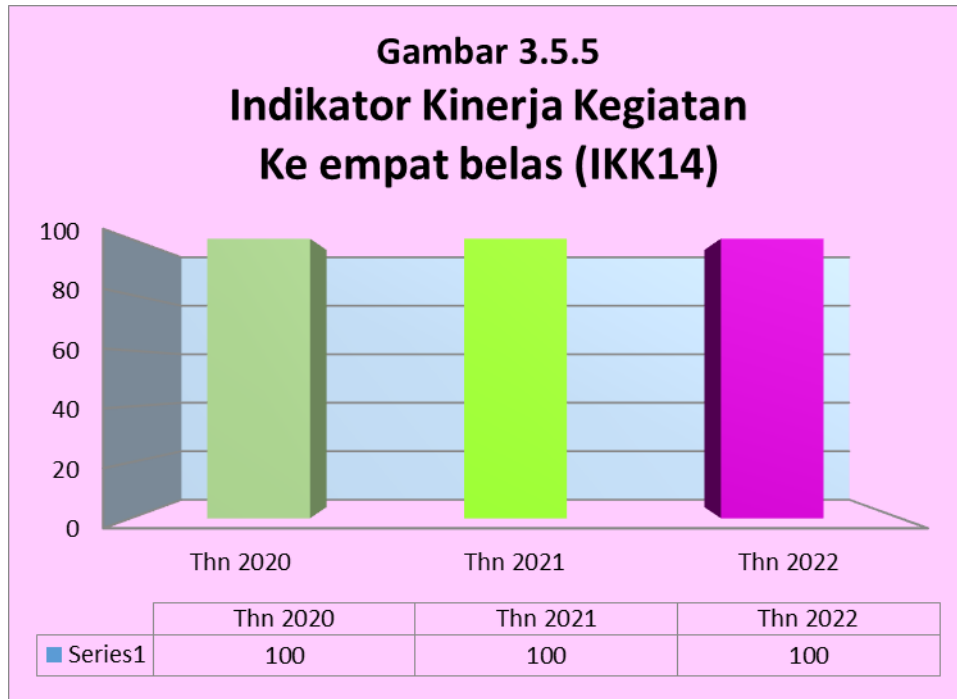


Penyusunan formasi pegawai itu pertama dibuat *budgeting* dan kebutuhan, selanjutnya dilihat dari kebutuhannya, lalu diusulkan melalui aplikasi e-formasi baik itu CPNS maupun PPPK setelah itu usulan akan di terima oleh Biro SDM dan Organisasi lalu di saring oleh Kemenpan RB.

Pada tahun 2022, Mahkamah Pelayaran Menerima 2 (dua) orang CPNS dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yaitu :

1. NOVITASARI PUTRI RAMADHANI, A.Md.Kb.N
2. QUSNUL VERA ISLAMIYA, A.Md.Ak.

- 5) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Administrasi Kepegawaian”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 59.670.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 59.670.000, sisa anggaran Rp. 0 dengan persentase 100%.



Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Pada tahun 2022, ada 5 orang yang Kenaikan Pangkat.

Pada per 01 April 2022 ada 4 orang yang Kenaikan Pangkat, yaitu

1. Susila Wardani, SE., M.Ak dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk I (III/d)
2. Dendi Darmawansyah, SH dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c)
3. Alexander Siagian, SE dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c)
4. Suprihatin Hasto Hardo Utomo dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b)

Pada per 01 Oktober 2022, ada 1 orang yang Kenaikan Pangkat, yaitu :

Indah Sri Wigati dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b)

V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Kementerian Perhubungan Tahun 2022, maka Anggaran APBN Kementerian Perhubungan yang dialokasikan untuk Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 17.487.930.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 7.910.596.000,-
- Belanja Barang : Rp. 9.032.981.000,-
- Belanja Modal : Rp. 544.353.000,-

Penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 17.448.347.994 atau sebesar 99,77% dengan rincian perbelanjaan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 7.910.400.310,-
- Belanja Barang : Rp. 8.993.595.467,-
- Belanja Modal : Rp. 544.352.217,-

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 dapat diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 perbulan

NO.	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (TINGKAT PENYERAPAN)
1	Januari	582.253.000	175.062.064	30,06%
2	Februari	1.806.668.000	1.561.876.894	86,45%
3	Maret	1.416.306.000	1.937.543.122	136,80%
4	April	2.588.626.000	2.047.622.995	79,10%
5	Mei	1.355.869.000	1.367.444.350	100,85%
6	Juni	1.841.375.000	1.688.679.763	91,70%
7	Juli	1.856.967.000	1.674.840.915	90,19%
8	Agustus	653.586.000	1.308.881.459	200,26%
9	September	1.175.052.000	1.394.266.434	118,65%
10	Oktober	1.274.086.000	1.478.748.255	116,06%
11	November	2.150.824.000	1.509.448.247	70,17%
12	Desember	786.318.000	1.303.933.496	165,83%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankj} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus di atas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{(30,06\%+86,45\%+136,80\%+79,10\%+100,85\%+91,70\%+90,19\%+200,26\%+118,65\%+116,06\%+70,17\%+165,83\%)}{12}$$

$$K = 107,17\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 107,17%.

Tabel 3.4. Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66	100	152	105.049.000	105.048.407	100
		2) Persentase penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	70	70	712.689.000	697.409.267	97,86
Rata-Rata Capaian Sasaran				222			199,96		
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Jumlah Keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	9.721.000	9.718.995	99,98
		4) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area perubahan	%	100	90,50	90,50	78.940.000	78.940.000	100
Rata-Rata Capaian Sasaran				190,50			199,58		
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100	0	0	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran				100			0		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	6) Penyusunan dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5	5	100	327.508.000	325.862.000	99,49
		7) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	99,77	99,77	124.650.000	124.650.000	100
		8) Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2	2	100	211.515.000	211.513.372	100
		9) Data statistik kecelakaan kapal	Dokumen	1	1	100	106.953.000	106.952.247	100
‘Rata-Rata Capaian Sasaran			399,77			399,49			
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	185	185	217.310.000	217.309.146	100
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2	2	100	143.000.000	142.478.275	99,64
		12) Pengembangan kompetensi SDM	Dokumen	4	4	100	98.538.000	98.538.000	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	100	100	100	56.000.000	56.000.000	100
		13) Pembinaan Admnistrasi Kepegawaian	%	100	100	100	59.670.000	59.670.000	100
Rata-Rata Capaian Sasaran			585			499,64			

B. Realisasi Anggaran

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Mahkamah Pelayaran sebesar **Rp. 17.487.930.000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	:	Rp.	7,910,596,000,-
- Belanja Barang	:	Rp.	9,032,981,000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP)	:	Rp.	544,353,000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

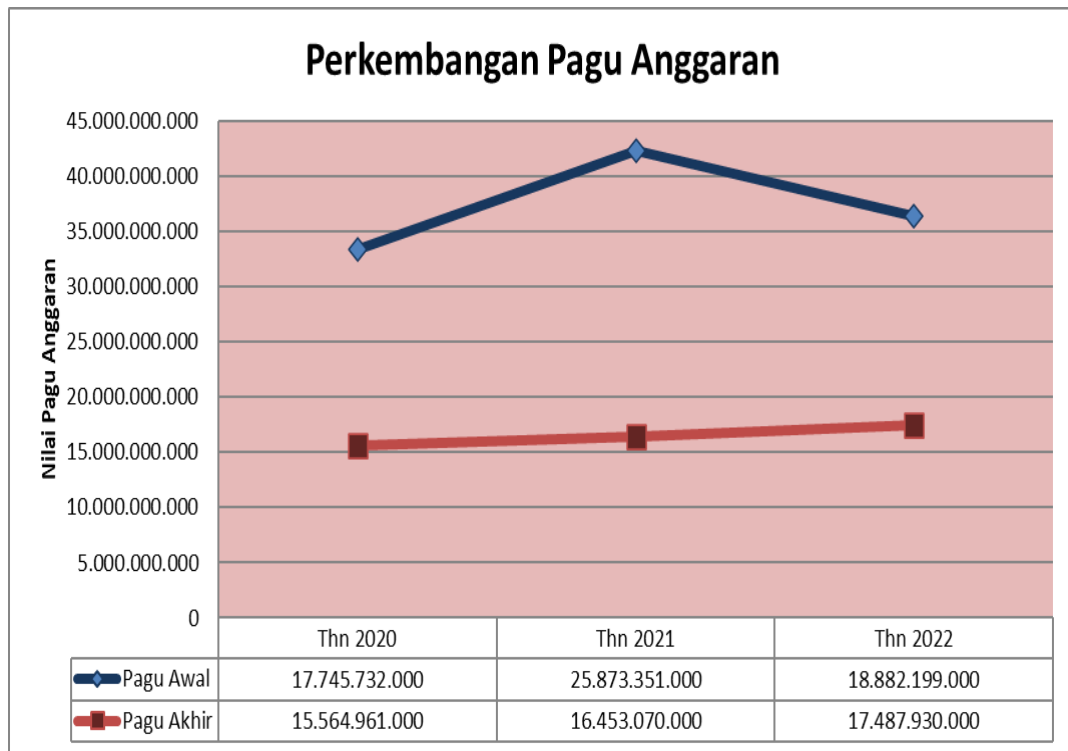
Tabel 3.5. Matriks Revisi Anggaran 2022

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	DIPA AWAL	18.882.199.000		Tanggal 17 November 2021
2	Revisi I		18.882.199.000	Tanggal 16 Desember 2021
3	Revisi II		18.882.199.000	Tanggal 15 Maret 2022
4	Revisi III		18.882.199.000	Tanggal 12 Mei 2022
5	Revisi IV		18.882.199.000	Tanggal 25 Mei 2022
6	Revisi V		18.882.199.000	Tanggal 30 Juni 2022
7	Revisi VI		18.622.214.000	Tanggal 26 Agustus 2022
8	Revisi VII		18.622.214.000	Tanggal 03 Oktober 2022
9	Revisi VIII		18.622.214.000	Tanggal 18 Oktober 2022
10	Revisi IX		17.487.930.000	Tanggal 08 Desember 2022

Tabel 3.6. Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020 - 2022

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pemotongan/ Pengurangan	Total
1	2020	17.745.732.000	2.180.771.000	15.564.961.000
2	2021	25.873.351.000	9.420.281.000	16.453.070.000
3	2022	18.882.199.000	1.394.269.000	17.487.930.000

Gambar 3.6. Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2020 – 2022



2) Realisasi Daya Serap Keuangan

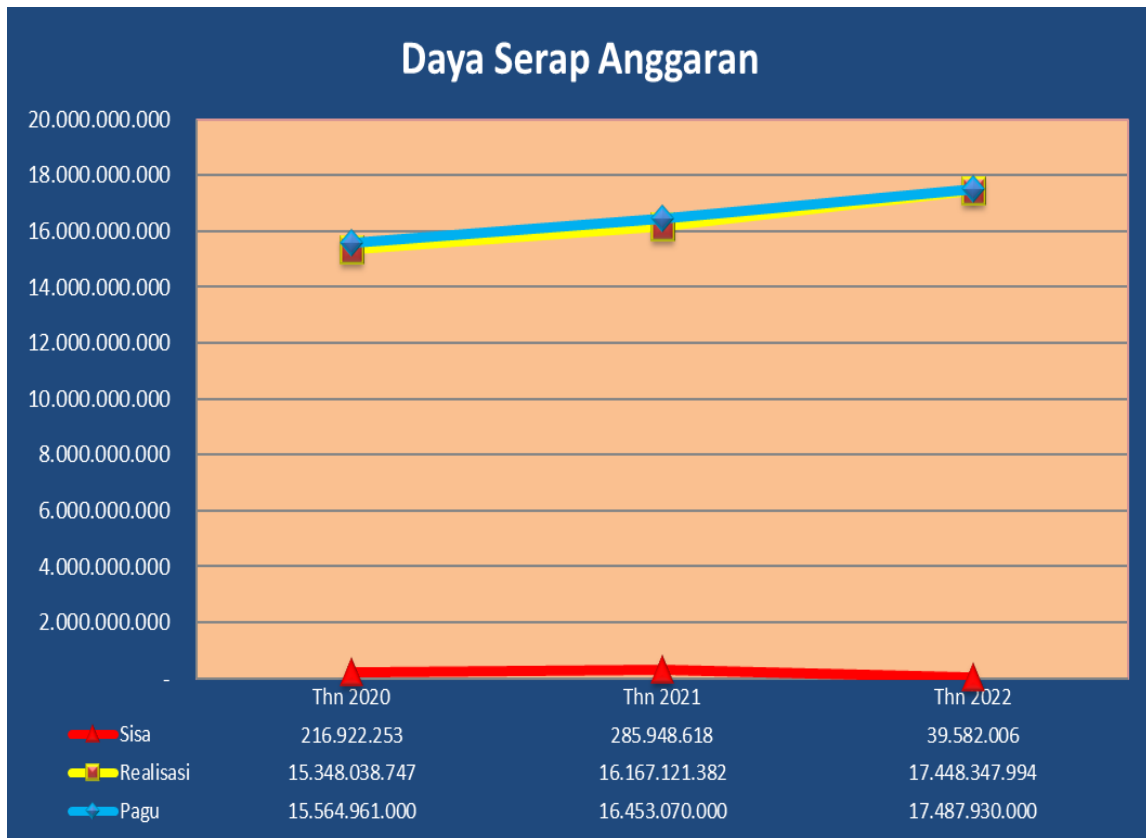
Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 – 2022 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2020	15.564.961.000	15.348.038.747	98,61	100	216.922.443	1,39
2021	16.453.070.000	16.167.121.382	98,26	100	285.948.618	1,74
2022	17.487.930.000	17.448.347.994	99,77	100	39.582.006	0,23

Catatan : Data s.d Bulan 31 Des 2022

Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Keuangan



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 sebesar Rp. 195.690,-, dengan detail sebagai berikut :

Tabel 3.8. Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Perse n
1	2	3	4	5
BELANJA PEGAWAI				
1965.994.001				
511111	1.716.520.000	1.716.894.940	- 374.940	100,02
511119	35.000	32.032	2.968	91,52
511121	110.645.000	110.458.876	186.124	99,83
511122	29.384.000	29.343.826	40.174	99,86
511123	75.520.000	75.520.000	-	100
511124	38.660.000	38.660.000	-	100
511125	8.054.000	8.052.515	1.485	99,98
511126	89.077.000	89.076.600	400	100,00
511129	228.677.000	228.350.000	327.000	99,86
511151	71.440.000	71.440.000	-	100
511519	3.667.860.000	3.667.860.000	-	100
512111	774.366.000	774.354.146	11.854	100
512411	1.100.358.000	1.100.358.000	-	100
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7.910.596.000	7.910.400.310	195.690	100%

b) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 sebesar Rp 39.385.533,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
BELANJA BARANG				
521111	2.008.991.000	2.000.377.371	8.613.629	99,57
521114	18.804.000	13.579.775	5.224.225	72,22
521115	156.540.000	156.290.000	250.000	99,84
521119	55.189.000	54.965.411	223.589	99,59
521131	200.215.000	200.214.377	623	100
521211	634.577.000	619.115.992	15.461.008	97,56
521213	13.160.000	13.160.000	0	100
521219	6.500.000	6.500.000	0	100
521811	225.480.000	225.373.200	108.800	99,95
522151	9.600.000	9.600.000	0	100
522192	56.050.000	55.983.000	67.000	99,88
523111	464.407.000	464.406.500	500	100
523121	980.281.000	980.116.884	164.116	99,97
524111	4.107.405.000	3.962.217.241	6.959.484	96,46
524113	11.970.000	10.890.000	1.080.000	90,97
524114	18.512.000	18.512.000	0	100
524119	65.300.000	65.300.000	0	100
JUMLAH BELANJA BARANG	9.032.981.000	8.993.595.467	39.385.533	99,56%

c) Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2022 Mahkamah Pelayaran Tahun 2022 sebesar Rp. 783,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
BELANJA MODAL				
532111	196.470.000	196.470.000	0	100%
533111	149.593.000	149.592.217	783	100
536111	198.290.000	198.290.000	0	100
JUMLAH BELANJA MODAL	544.353.000	544.352.217	783	100%
TOTAL BELANJA	17.487.930.000	17.448.347.994	39.582.006	99,77%

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

Kode/ Nama Kegiatan	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
1932 Legislasi dan Litigasi	0	0	0	
1933 Pengelolaan Organisasi dan SDM	970,301,000	963,957,406	6,343,594	99.35%
1938 Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	2,084,706,000	2,068,660,890	16,045,110	99.23%
1941 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	391,909,000	391,894,147	14,853	100%
4657 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	14,041,014,000	14,023,835,551	17,178,449	99.88%
TOTAL BELANJA	17,487,930,000	17,448,347,994	39,582,006	99.77%



A. KESIMPULAN

1. Penyusunan laporan kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan dan disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Nilai capaian kinerja sasaran program dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Pelayaran selama periode tahun anggaran 2022 mencapai 152%, sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 100% dari alokasi anggaran. Capaian kinerja secara garis besar sebagai berikut :
 - a. **Sasaran pertama adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”**
 - 1) Pada Indikator Kinerja “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 66%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 152%;
 - 2) Pada Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 70% dan capaian kinerja 70%.

b. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”

- 3) Pada Indikator Kinerja “Jumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%;
- 4) Pada Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan” Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 90.50% dan capaian kinerja 90,50%;

c. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”

- 5) Pada Indikator Kinerja “Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 1 Peraturan dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%..

d. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran”

- 6) Pada Indikator Kinerja “Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP.”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 5 dengan realisasi 5 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.;
- 7) Pada Indikator Kinerja “Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 99,77% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 99,77%;
- 8) Pada Indikator Kinerja “Barang Milik Negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 2 dengan realisasi 2 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 9) Pada Indikator Kinerja “Data Statistik Kecelakaan Kapal”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%

e. Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran”

- 10) Pada Indikator Kinerja “Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)” Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 185% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 185%;
- 11) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 2 dengan realisasi 2 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 12) Pada Indikator Kinerja “Pengembangan kompetensi SDM”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 4 dengan realisasi 4 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 13) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Pegawai”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 14) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Administrasi Kepegawaian”. Target kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%

Gambar 4. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022



Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan Unit Kerja Mahkamah Pelayaran telah berhasil dalam mencapai kinerjanya. Karena hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan melebihi dari target awal yang telah ditentukan.

B. SARAN /REKOMENDASI

Beberapa hal yang direkomendasikan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pegawai yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran masih kurang untuk kontribusi tertentu seperti untuk tenaga IT, sehingga perlu adanya penambahan pegawai yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kegiatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pelayaran dibidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Mahkamah Pelayaran sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai bentuk kesiapan Mahkamah Pelayaran dalam menghadapi tantangan tugas di masa mendatang.
3. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui Diklat/Pelatihan-pelatihan, sehingga kinerja para aparatur negara dalam bekerja semakin meningkat
4. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran belum memadai, perlu dilakukan renovasi gedung kantor serta ketersediaan alat-alat menunjang pekerjaan kantor seperti Perekam, PC, Laptop, Printer, Proyektor dan lain-lain.
5. Upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang.
6. Instrumen manajemen risiko perlu diterapkan untuk menjaga setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan sasaran diidentifikasi dan dimitigasi sehingga berada dalam level yang dapat diterima manajemen sepanjang tahun 2022.
7. Perlu koordinasi dengan instansi Kemenhub pusat untuk menyampaikan kendala dalam peningkatan profesionalisme bagi para anggota panel ahli, pejabat struktural, pejabat fungsional terutama dalam hal penyusunan peraturan Maupun SOP, yaitu :
 - a. Memberikan pelatihan yang selaras dengan tantangan tugas maupun perkembangan teknologi terutama dalam hal perkembangan sistem aplikasi informasi berbasis teknologi .
 - b. Meningkatkan metode dan kualitas penyelesaian tindak lanjut.
 - c. Melakukan percepatan penanganan kasus pemeriksaan kecelakaan kapal

- d. Meningkatkan sosialisasi dan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan website Mahkamah Pelayaran oleh masyarakat.
- 8. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari berbagai pihak baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, *civil society* maupun Aparat Penegak Hukum/APH.
- 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi kepada Masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, terlaksananya forum tatap muka dengan insan komunikasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2022**



**MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT ESELON II
SATUAN KERJA MAHKAMAH PELAYARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARY KRISWANTO, S.H., DESS.

Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

PIHAK KEDUA

Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001

PIHAK PERTAMA



HARY KRISWANTO, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631115 199203 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA ESELON II MAHKAMAH PELAYARAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	%	66
		2)	Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	3)	Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
		4)	Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5)	Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	6)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH & SPIP	Dokumen	5
		7)	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		8)	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2

		9)	Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1
5.	Menigkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	10)	Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100
		11)	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2
		12)	Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4
		13)	Pembinaan Pegawai	%	100
		14)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya diselenggarakan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 17.487.930.000, terdiri dari :

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 970.301.000
2. Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp. 2.084.706.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 391.909.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 14.041.014.000

SEKRETARIS JENDERAL



Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001

Jakarta, Desember 2022

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



HARY KRISWANTO, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631115 199203 1 001



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2022**

Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Jalan Bulevar Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara 14250

No. Telp. (021) 4533331, 4509166, Fax : 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id

Email : mahkamah_pelayaran@yahoo.co.id



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA ESELON II MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66
		2)	Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	3)	Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
		4)	Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	5)	Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1

4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	6)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5
		7)	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		8)	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2
		9)	Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	10)	Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100
		11)	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2
		12)	Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4
		13)	Pembinaan Pegawai	%	100
		14)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



HARY KRISWANTO, S.H.,DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631115 199203 1 001



**PERUBAHAN RENCANA AKSI
MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2022**

Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Jalan Bulevar Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara 14250

No. Telp. (021) 4533331, 4509166, Fax : 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id

Email : mahkamah_pelayaran@yahoo.co.id

Perubahan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Unit Kerja Eselon II Mahkamah Pelayaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Penanggung Jawab
					TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SK1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IK1 Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	66%	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Pelayaran	3				Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
		IK2 Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	100%	Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran	7	7	8	8	
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IK3 Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	100%	Pengelola Berita Website Mahpel	5	5	5	5	
		IK4 Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	100%	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan Mahkamah Pelayaran			100		
SK3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IK5 Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	1 Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Mahkamah Pelayaran				1	
SK4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IK6 Penyusunan Dokumen Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH dan SPIP	5 Dokumen	Penyusunan Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH dan SPIP	2	3			
		IK7 Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	100%	Monitoring Daya Serap	25	25	25	25	
		IK8 Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	2 Dokumen	Pembinaan Pengelolaan BMN dan Penyusunan Laporan BMN		1		1	
		IK9 Data Statistik Kecelakaan Kapal	1 Dokumen	Pengumpulan dan Penyusunan data Statistik Kecelakaan Kapal		1			
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IK10 Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	100%	FGD dan Sosialisasi Lanjutan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		50	50		
		IK11 Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	2 Dokumen	Pengelolaan Arsip Perkantoran Mahkamah Pelayaran				2	
		IK12 Pengembangan Kompetensi SDM	4 Dokumen	Pemantapan Pegawai, Pengembangan, Kompetensi & peningkatan SDM Mahpel, Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perkara dan Bidang Keuangan	1	1	1	1	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Penanggung Jawab
					TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		IK13 Pembinaan Pegawai	100%	Penyusunan Formasi Pegawai				1	
		IK14 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	100%	Penyusunan Kenaikan Pangkat		3		2	

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



HARY KRISWANTO, S.H.,DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631115 199203 1 001

Perubahan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Unit Kerja Eselon II Mahkamah Pelayaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Realisasi Tahun 2022												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IK1 Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	66	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Pelayaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	105.049.000	Kuasas Pengguna Anggaran (KPA)
		IK2 Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	712.689.000	
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IK3 Jumlah Keputusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	Pengelola Berita Website Mahpel	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	9.721.000	
		IK4 Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan Mahkamah Pelayaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	78.940.000	
SK3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IK5 Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Mahkamah Pelayaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	
SK4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IK6 Penyusunan Dokumen SAKIP, LAPTAH dan SPIP	Dokumen	5	Penyusunan Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH dan SPIP	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	327.508.000	
		IK7 Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	Monitoring Daya Serap	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	124.650.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Realisasi Tahun 2022												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
SK5	Menigkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IK8 Barang Milik Negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	2	Pembinaan Pengelolaan BMN dan Penyusunan Laporan BMN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	211,515,000	
		IK9 Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1	Pengumpulan dan Penyusunan data Statistik Kecelakaan Kapal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	106.953.000	
		IK10 Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	100	FGD dan Sosialisasi Lanjutan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	217.310.000	
		IK11 Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	2	Pengelolaan Arsip Perkantoran Mahkamah Pelayaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	143,000,000	
		IK12 Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	4	Pemantapan Pegawai, Pengembangan, Kompetensi & peningkatan SDM Mahpel, Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perkara dan Bidang Keuangan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	98.538.000	
		IK13 Pembinaan Pegawai	%	100	Penyusunan Formasi Pegawai	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	56,000,000	
		IK14 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100	Penyusunan Kenaikan Pangkat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	59,670,000	

